

**EVALUASI PROGRAM LAYANAN ANAK INTEGRATIF DI
KABUPATEN GOWA**

Disusun dan diusulkan oleh

KIKI REZKI AMALIA

Nomor Stambuk: 10561 04922 14



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

**EVALUASI PROGRAM LAYANAN ANAK INTEGRATIF
DI KABUPATEN GOWA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh :

KIKI REZKI AMALIA

Nomor Stambuk : 105610492214



PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Evaluasi Program Layanan Anak Integratif
di Kabupaten Gowa**


Nama Mahasiswa : **Kiki Rezki Amalia**

Nomor Stambuk : **105610492214**

Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

Menyetujui :

Pembimbing I Pembimbing II


 

Dr. Jaelan Usman, M.Si **Dr. Hj Rulinawaty Kasmad, S.Sos., M.Si**

Mengetahui,

Dekan Ketua Jurusan

Fisipol Unismuh Makassar Ilmu Administrasi Negara


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si.


Nasrul Haq, S.Sos., MPA

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/ Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisip Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan Nomor : 0029/FSP/A.4-II /V /40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.1) dalam program Studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Senin 27 Mei 2019.

TIM PENILAI

Ketua Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji :

1. Dr. Jaelan Usman, M.Si (Ketua)

2. Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si

3. Dr. Syamsir Rahim, S.Sos., M.Si

4. Nasrulhaq, S.Sos., MPA

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Kiki Rezki Amalia

Nomor Stambuk : 105610492214

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa Skripsi ini dengan judul: “Evaluasi Program Layanan Anak Integratif di Kabupaten Gowa” adalah sepenuhnya merupakan karya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan hasil plagiat dari karya orang lain, tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang ditujukan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya ini.

Makassar, 27 Mei 2019

Yang Menyatakan,



Kiki Rezki Amalia

ABSTRAK

Kiki Rezki Amalia, 2019.*Evaluasi Program Layanan Anak Integratif di Kabupaten Gowa* (dibimbing oleh Rulinawaty Kasmad dan Jaelan Usman).

Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses yang dilakukan untuk melihat sejauh mana implementasi dari suatu program kebijakan yang ada. Dari hasil evaluasi nantinya akan terlihat apakah program Layanan Anak Integratif ini benar-benar memberi manfaat bagi anak-anak yang membutuhkan pelayanan.. Berdasarkan hal tersebut peneliti terdorong untuk melakukan Evaluasi Program Layanan Anak Integratif di Kabupaten Gowa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi program layanan anak integrative dengan menggunakan teori logic model. Dimana dalam teori Logic Model ada empat indikator yang digunakan dalam mengevaluasi suatu program yaitu indikator input, proses, Output dan Outcome. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum keadaan yang sebenarnya secara jelas yang ada di lapangan. Kemudian data yang dikumpul dari hasil penelitian dilapangan secara obyektif dengan tipe deskriptif. Jenis penelitian kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara terhadap sejumlah informan. Analisis data menggunakan analisa interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi Program Layanan Anak Integratif di Kabupaten Gowa sudah terlaksana dengan baik dan sudah sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan. Dilihat dari indikator Input, yang meliputi Sumber daya manusia, dana sarana dan prasaran. Dimana SDM dalam program ini benar-benar berkompeten dalam memberikan pelayanan kemudian dana yang bersumber dari APBN yang kemudian didukung dengan APBD sebagai dana sharing. Dari segi sarana dan prasarana masih belum memadai karena belum adanya fasilitas rumah shelter yang merata di setiap Kecamatan bagi anak-anak korban kekerasan. Indikator Proses yang meliputi aktifitas dan strategi, dimana perlu adanya peningkatan kerjasama antar SKPD terkait kemudian kegiatan sosialisasi secara rutin perlu diadakan dalam mensukseskan program Layanan Anak Integratif. Indikator Output yang meliputi layanan dan target sasaran sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pelayanan kemudian indikator Outcome yang meliputi manfaat dan respon partisipan, dimana kedepan dengan terus melakukan peningkatan dalam memberikan pelayanan program ini akan semakin banyak membantu anak-anak yang memang membutuhkan pelayanan.

Kata Kunci: Evaluasi Program, Layanan Anak Integratif

KATA PENGANTAR



“Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang”

Assalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Evaluasi Program Layanan Anak Integratif di Kabupaten Gowa”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang penulis ajukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Ucapan terima kasih pertama-tama penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, ayahanda tercinta **Mustafadan Almarhumah** Ibunda tercinta **Endang Sujiani** Atas dukungan, semangat serta doa-nya yang tidak pernah berhenti diberikan kepada penulis agar selalu diberikan kemudahan dan kelancaran untuk setiap segala urusannya. Terima Kasih atas segala perjuangan dan pengorbanannya, semoga ayahanda senantiasa di rahmati oleh Allah SWT dan dan Almarhumah ibunda diberikan tempat terbaik disisi Allah SWT. Kepada **Muh. Arief Hidayatullah Rahman** yang selalu mengantar penulis bimbingan dan memberikan bantuan dan semangat untuk mengalihkan rasa lelah dalam proses penyusunan skripsi ini, dan saudaraku **Hafiez, Andri, Ferry dan Hairil** Terima kasih atas semua bentuk penyemangatnya yang tidak bisa tertebak.

Banyaknya rintangan dan tantangan yang harus penulis hadapi dalam penyelesaian skripsi ini dan menyadari bahwa hal ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang selalu mengarahkan penulis untuk mencapai dan memperoleh kebenaran untuk menyelesaikan skripsi ini. Izinkan penulis untuk memberikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak **Dr. H. Abd Rahman Rahim, S.E., M.M** selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ayahanda **Dr. Jaelan Usman, M.Si** selaku pembimbing I dan Ibunda **Dr. Hj. Rulinawaty Kasmad, S.Sos., M.Si** selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Ibunda **Dr. Hj. Ihyani Malik, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Kakanda **Nasrul Haq, S.Sos., M.PA** selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Kakanda **Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP** selaku sekretaris jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Segenap Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah sudi berbagi ilmunya kepada penulis selama ini.

6. Para pihak Dinas/Instansi yang ada pada lingkup Dinas Sosial Kab. Gowa dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Gowa yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian..
7. Buat Saudariku Mancung Squad yang telah menemani, menyemangati, serta selalu memberikan dukungan dan dorongan kepada saya selama ini, **Nur Eka Puspita Muchtar, S.Sos, Hastina Hamsah, S.Sos, Nadia Dwiyanti Pertiwi, S.Sos, Iin Novianti dan Jumaisa**
8. Buat **St. Nurhijriah, S.Sos dan Hardianti, S.Sos** yang senantiasa memberikan bantuan yang tiada ternilai baik moral maupun materi kepada penulis.
9. Kepada Saudariku yang selama ini telah memberikan dorongan semangat dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini, **Divya Nadyah, S.Sos, Ria Asriani, Siti Jumriani, A. Afni Rizmaryani, S.E, Aini Maghfirah, S.Pd, Rizqi Audyah, S.T dan Zhulhairah Akhyar, S.Pd**
10. Kepada Kakanda, adinda dan teman-teman pengurus **BEM Fisip** yang telah memberikan ruang kepada penulis untuk berproses di dalamnya.
11. Seluruh teman-teman kelas **ADN014C** yang selama ini selalu bersama-sama mengikuti jadwal kuliah yang selalu punya cerita dan pengalamannya tersendiri didalam kelas.
12. Kepada seluruh keluarga besar **SOSPOL Universitas Muhammadiyah Makassar** terutama kepada satu angkatan penulis **AFILIASI 2014** yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnyamembangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi penelitian inibermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yangmempbutuhkan.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 27 Mei 2019

Penulis,

Kiki Rezki Amalia



DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Penerimaan Tim	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kebijakan Publik	6
1. Definisi Kebijakan Publik	6
2. Tahap-Tahap Dalam Kebijakan Publik	8
B. Evaluasi Kebijakan Publik	13
1. Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik	15
2. Tujuan Evaluasi Kebijakan Publik	15
3. Model Evaluasi Kebijakan Publik	16
C. Program Layanan Anak Integratif	19
1. Kelompok Sasaran Layanan Anak Integratif	20
2. Fokus Layanan Anak Integratif	20
D. Penelitian Yang Relevan	22
E. Kerangka Pikir	23
F. Fokus Penelitian	24
G. Deskripsi Fokus Penelitian	24
BAB III. METODE PENELITIAN	26
A. Waktu dan Tempat Penelitian	26
B. Jenis dan Tipe Penelitian	26
C. Sumber Data	27
D. Informan Penelitian	27
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Analisis Data	29
G. Pengabsahan Data	30

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
1. Gambaran Umum Kabupaten Gowa	32
2. Profil Dinas Sosial Kabupaten Gowa	33
3. Profil Sekretariat Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Sikamaseang	43
B. Implementasi Program Layanan Anak Integratif di Kab.Gowa	48
C. Evaluasi Program Layanan Anak Integratif di Kab. Gowa.....	50
1. Input	50
2. Proses	57
3. Output	62
4. Outcome	68
D. Dampak program Layanan Anak Integratif di Kab. Gowa.....	75
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81



DAFTAR TABEL

A. Tabel 2.1 Penelitian Yang Relevan.....	22
B. Tabel 3.1 Informan Penelitian	28
C. Tabel 4.1 Data Rekap Kasus Anak Kab.Gowa 2017-2018	48
D. Tabel 4.2 Input Program Layanan Anak Integratif Kab.Gowa	51
E. Tabel 4.3 Proses Program Layanan Anak Integratif Kab.Gowa	57
F. Tabel 4.4 Output Program Layanan Anak Integratif Kab.Gowa.....	62
G. Tabel 4.5 Outcome Program Layanan Anak Integratif Kab.Gowa	68



DAFTAR GAMBAR

A. Gambar 2.1 Kerangka Pikir	23
B. Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kab. Gowa	35
C. Gambar 4.2 Alur Pelayanan PKSAl Sikamaseang Kab.Gowa	45
D. Gambar 4.3 Alur Penanganan Kasus PKSAl Sikamaseang Kab.Gowa	46
E. Gambar 4.4 Bagan Organisasi PKSAl Sikamaseang Kab.Gowa	46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tahapan yang paling penting dalam siklus kebijakan publik adalah evaluasi kebijakan publik. Tahapan evaluasi menjadi begitu penting setelah melewati tahap-tahap lain dalam alur kebijakan publik, maka hal utama yang harus dilakukan adalah mengevaluasi suatu program atau kebijakan yang ada. Perlu dipahami bahwa proses evaluasi sangat penting dilakukan untuk melihat suatu kebijakan publik yang sudah diterapkan apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan (Budi Winarno:229).

Evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengetahui akibat-akibat yang dihasilkan dari adanya suatu kebijakan dengan melihat keberhasilannya. Hal ini merujuk pada usaha untuk melihat apakah program kebijakan publik mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan atau tidak. Selain itu evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan atau program yang dijalankan sudah sesuai dengan yang diharapkan. Informasi mengenai penyebab tidak berjalannya suatu kebijakan dijadikan sebagai pembelajaran dalam membuat kebijakan selanjutnya (Budi Winarno:229-230).

Evaluasi terhadap suatu kebijakan atau program sangat penting dilakukan karena nantinya kebijakan selanjutnya bisa lebih baik dari sebelumnya. Selain itu dengan adanya evaluasi ini diharapkan kita dapat melihat seberapa jauh suatu kebijakan dapat mencapai tujuan. Selain itu, dengan adanya evaluasi ini juga untuk memenuhi aspek akuntabilitas publik yaitu untuk menilai kebijakan yang

dibuat pemerintah. Evaluasi dalam hal ini dijadikan pembelajaran dalam pembuatan kebijakan selanjutnya dan diharapkan kebijakan yang ada akan lebih baik. Dijelaskan juga oleh Leo Agustino yang berpendapat bahwa evaluasi kebijakan tidak saja diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi dari penilaian yang dilakukan atas program atau kebijakan yang dievaluasi tetapi lebih menjurus pada perumusan metodologi pembelajaran agar kelemahan/ kekurangan metodologi yang digunakan tidak terulang pada waktu dan tempat yang akan datang (Mulyadi, 2016:92-93).

Pemerintah telah membuat berbagai kebijakan atau program. Salah satu program yang dibuat oleh pemerintah adalah program layanan untuk perlindungan dan kesejahteraan anak. Kementerian sosial bekerja sama dengan UNICEF (United Nasional Children's Fund) membentuk program layanan anak integratif nasional. Kementerian sosial menetapkan beberapa kabupaten dan kota sebagai percontohan layanan kesejahteraan anak integratif nasional di antaranya adalah Kabupaten Surakarta, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Tulungagung di Jawa dan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa untuk Sulawesi Selatan.

Kasus-kasus mengenai masalah kesejahteraan pada anak di Sulawesi Selatan paling banyak terdapat di Kabupaten Gowa. Berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pemulung tertinggi berada di Kabupaten Gowa sebanyak 159.114 orang, sedangkan di Kota Makassar sebanyak 42.986 orang (<http://www.seputarsulawesi.com>.2016). Selain maraknya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pemulung di Kabupaten Gowa, terdapat pula kasus

yang menyebabkan anak harus berhadapan dengan hukum. Berdasarkan data anak berhadapan hukum (ABH) tahun 2015, terdapat 73 kasus, terbagi 43 kasus kekerasan, 13 kasus pencabulan, 7 kasus persetujuan, 1 kasus penculikan dan 9 kasus pencurian. Tahun 2016, terdapat 49 kasus, terbagi 23 kasus kekerasan, 4 kasus pencabulan, 13 kasus persetujuan, 6 kasus perkelaian dan 1 kasus pencurian. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak anak yang belum terpenuhi hak-haknya dan bahkan mengalami perlakuan yang salah (Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif, 2017).

Melihat masih banyaknya kasus kekerasan pada anak diatas sudah menjadi tugas pemerintah memberikan secara maksimal layanan kesejahteraan sosial anak yang menyeluruh di Kabupaten Gowa, sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Gowa untuk perlindungan anak Tertuang dalam Perbup No. 35 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Gowa. Layanan kesejahteraan sosial anak hadir dalam wujud Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Gowa untuk perlindungan anak. Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) di Kabupaten Gowa diberi nama PKSAI Sikamaseang dengan adanya program ini diharapkan anak-anak dapat terlindungi dari kekerasan, dan bisa hidup layak.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis hendak meneliti dan mengkaji lebih jauh bagaimana evaluasi program Layanan Anak Integratif di Kabupaten Gowa dengan menggunakan Logic Model oleh Joseph S. Wholey dengan judul "Evaluasi Program Layanan Anak Integratif di Kabupaten Gowa".

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan-batasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi *Input* dalam program Layanan Anak Integratif di Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana evaluasi *Proses* dalam program Layanan Anak Integratif di Kabupaten Gowa?
3. Bagaimana evaluasi *Output* dalam program Layanan Anak Integratif di Kabupaten Gowa?
4. Bagaimana evaluasi *Outcome* dalam program Layanan Anak Integratif di Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan bagaimana evaluasi *Input* dalam program Layanan Anak Integratif di Kabupaten Gowa.
2. Untuk menjelaskan bagaimana evaluasi *Proses* dalam program Layanan Anak Integratif di Kabupaten Gowa.
3. Untuk menjelaskan bagaimana evaluasi *Output* dalam program Layanan Anak Integratif di Kabupaten Gowa.
4. Untuk menjelaskan bagaimana evaluasi *Outcome* dalam program Layanan Anak Integratif di Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan yang digunakan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa dan menjadi bahan masukan bagi peneliti yang terkait dengan bidang penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Gowa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik melihat berbagai teori dan proses yang terjadi dalam Kebijakan Publik. Kebijakan itu sendiri terbentuk dari proses pembentukan kebijakan.

1. Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Alwi dan Rulinawaty Kasmad (2015:2) mengatakan bahwa Kebijakan Publik adalah alokasi nilai pejabat publik karena pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan sangat bergantung pada konteks dan nilai preferensi. Kebijakan Publik adalah satu dari beberapa hal penting dalam bidang ilmu dan aktivitas dari Administrasi Publik. Kebijakan Publik merupakan salah satu hal pokok dalam Administrasi Publik, Kebijakan Publik digambarkan fungsinya seperti otak pada tubuh manusia, karena menjadi inti dan pusat dari seluruh kegiatan kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Deddy Mulyadi,2016:1).

Kebijakan public menurut Carl J.Friedrick :”*public policy is a proposed course of action of a person, group,or government within a given environment providing abstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or purpose.* Kebijakan publik adalah seluruh rangkaian aktivitas yang diajukan seseorang, kelompok, atau pemerintah pada lingkungan tertentu dengan memperlihatkan kendala-kendala maupun peluang terhadap pelaksanaan kebijakan yang

diajukan dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai. Selain itu kebijakan publik menurut James E. Anderson :”*public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*. Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh aparat pemerintah (Suratman, 2017:10-11).

Sedangkan Kebijakan publik menurut Robert Eyeston:”*the relationship of government unit to its environment*”. Kebijakan publik adalah hubungan aktivitas satu unit pemerintah dengan lingkungannya. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai *democratic governance*, karena terjadi hubungan timbal balik suatu Negara terhadap rakyatnya guna menyelesaikan permasalahan publik. Selain itu kebijakan publik menurut Thomas R. Dye:”*public policy is whatever governments choose to do or not to do*”. Kebijakan publik adalah pilihan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan ataupun tidak melaksanakan sesuatu. Pemerintah harus bersikap bijak dan perlu pertimbangan dalam memutuskan suatu kebijakan agar kebijakan yang lahir dapat memberikan manfaat yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat bukan malah menimbulkan masalah yang bisa merugikan masyarakat itu sendiri (Taufiqurokhman, 2014:49).

Berdasarkan definisi kebijakan publik diatas, dapat disimpulkan Kebijakan Publik yaitu tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah, dimana kebijakan ini dibuat untuk memecahkan masalah yang ada dalam rangka memperoleh tujuan yang hendak dicapai serta dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

2. Tahap- tahap dalam Kebijakan Publik

Dalam proses pembuatan Kebijakan Publik terdapat beberapa tahapan penting didalamnya sehingga dapat terbentuknya suatu kebijakan. Tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Agenda Setting

Sebelum masalah masuk ke dalam agenda kebijakan, masalah tersebut biasanya menjadi isu terlebih dahulu. Isu kebijakan merupakan suatu hal yang terjadi didalam maupun diluar organisasi yang jika tidak ditangani dengan baik akan berdampak negatif bagi organisasinya. Masalah-masalah kebijakan begitu luas, maka tidak semua isu-isu yang beredar di masyarakat bisa masuk dalam agenda kebijakan. Hanya isu- isu yang berhasil menyita banyak perhatian dari yang dapat menjadi agenda kebijakan (Deddy Mulyadi, 2016:5).

Agenda kebijakan yaitu tahapan dimana aktor pembuat kebijakan memilih beberapa isu yang dianggap terpenting. Dengan begitu, agenda kebijakan bisa dipisahkan dengan kepentingan-kepentingan politik. Sehingga dalam agenda kebijakan betul-betul mengedepankan suatu agenda yang lebih penting daripada agenda yang lain. Proses agenda kebijakan terjadi pada saat pejabat publik mempelajari beberapa masalah-masalah baru dan mengambil keputusan untuk menanggapi dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan demikian, agenda kebijakan yaitu pertarungan wacana yang terdapat dalam lembaga pemerintah (Deddy Mulyadi, 2016:6).

Hanya masalah tertentu saja yang bisa sampai ke agenda kebijakan. Isu-isu atau masalah tersebut harus mampu bersaing dengan isu yang lain yang nantinya hanya masalah-masalah yang terpilih saja yang diterima dan masuk ke agenda kebijakan. *Lester dan Stewart* menyatakan bahwa kriteria isu yang bisa diterima ke agenda kebijakan jika sesuai dengan kriteria berikut :

1. Bila suatu isu telah melewati suatu proporsi krisis dan tidak bisa di biarkan terlalu lama.
2. Bila isu tersebut memiliki sifat partikularis, apabila isu tersebut memperlihatkan dan mendramatisir isu yang lebih besar.
3. Mempunyai aspek emosional dan menyita perhatian media karena disebabkan *human interest*
4. Memicu timbulnya tanda tanya mengenai kekuasaan dan legitimasi dan masyarakat
5. Isu tersebut sedang diminati oleh banyak orang (Deddy Mulyadi, 2016:6).

Pada tahap penyusunan agenda kebijakan ada tiga tindakan yang perlu dilaksanakan yakni :

1. Membangun persepsi di kalangan pemangku kepentingan bahwa sebuah fenomena benar-benar dilihat sebagai suatu permasalahan. Sebab bisa saja suatu gejala oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap masalah, tetapi oleh sebagian masyarakat yang lain atau elite politik bukan dianggap sebagai masalah
2. Membuat batasan Masalah

3. Memobilisasi dukungan agar masalah itu bisa diterima dalam agenda pemerintah. Bentuk dukungan berupa cara mengatur kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, dan kekuasaan-kekuasaan politik, diperkenalkan melalui media dan sebagainya (Subarsono,2015:11-12).

b. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah ada di agenda kebijakan lalu dibahas oleh pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi dirumuskan untuk kemudian diselesaikan dengan penyelesaian masalah dengan sebaiknya. Penyelesaian masalah bersumber dari beberapa alternatif kebijakan yang tersedia. Sama seperti kompetisi suatu masalah untuk bisa diterima kedalam agenda kebijakan, tahap dalam Formulasi kebijakan dimana beberapa pilihan bersaing untuk dapat masuk sebagai suatu kebijakan yang dipilih untuk menyelesaikan masalah (Budi Winarno, 2012:36).

Aktivitas formulasi kebijakan merupakan tahap awal dari kegiatan pembuatan kebijakan publik, yang melibatkan pemerintah dan pihak lain sesuai dengan kebutuhan. Formulasi kebijakan merupakan inti dari proses pembuatan kebijakan publik yang mengisyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan yang relevan dan teruji, untuk menghasilkan alternatif-alternatif solusi yang mengarah kepada pemecahan masalah publik dalam agenda kebijakan tersebut.

Adapun tahapan-tahapan dalam formulasi kebijakan terdiri dari :

1. Pengkajian masalah kebijakan
2. Penentuan tujuan
3. Pengembangan alternatif

4. Pembuatan model
5. Penentuan kriteria penilaian
6. Penilaian alternatif
7. Perumusan rekomendasi (Deddy Mulyadi, 2016:10).

c. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan yaitu pelaksanaan kebijakan apabila Undang-Undang sudah dibuat. Implementasi adalah pelaksanaan kebijakan yang mana beberapa aktor yang berperan bekerja sama dalam pelaksanaan kebijakan guna mencapai tujuan dari suatu program (Budi Winarno, 2008:144).

Implementasi kebijakan merupakan satu dari beberapa tahapan penting dalam kebijakan publik. Implementasi sering diartikan sebagai pelaksanaan kebijakan dari pembuat kebijakan, seakan-akan tahapan ini tidak terlalu berpengaruh. Namun dalam realitasnya, implementasi merupakan tahapan yang urgen dikarenakan kebijakan tidak berarti apa-apa jika kebijakan tersebut tidak dijalankan dengan baik. Dengan kata lain, implementasi adalah tahap pengimplementasian dari seluruh kebijakan yang ada sehingga tercapai apa yang menjadi tujuan dibuatnya kebijakan tersebut (Suratman, 2017:25).

Pelaksana kebijakan senantiasa diawali dari aktor Negara atau pemerintah sebagai *agensi eksekutif*. Ada empat pilihan aktor implementasi yang sesungguhnya, yaitu:

1. Pemerintah. Meliputi kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan keberadaan bangsa dan Negara.

2. Pemerintah pelaku utama, masyarakat pelaku pendamping. Disini termasuk pelayanan KTP dan KK yang merupakan bentuk kerjasama nonpemerintah di tingkat masyarakat.
3. Masyarakat pelaku utama, pemerintah pelaku pendamping. Kegiatan layanan publik yang diadakan masyarakat, yang mendapat subsidi dari pemerintah.
4. Masyarakat sendiri, termasuk didalamnya kebijakan dalam pengembangan ekonomi yang diadakan masyarakat meliputi bermacam-macam aktifitas bisnis (Riant Nugroho, 2011:649-650).

Implementasi kebijakan yaitu tahapan yang urgen dalam suatu kebijakan. kebijakan harus dijalankan agar tercapai dari apa yang diharapkan. Implementasi kebijakan merupakan kerjasama dari beberapa aktor yang terlibat didalamnya untuk melaksanakan kebijakan agar tercapai apa yang diharapkan (Suratman, 2017: 26).

Suatu program kebijakan tidak akan ada artinya apabila program tersebut tidak di implementasikan. Implementasi kebijakan merupakan segala bentuk aktivitas untuk mendapatkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut instansi yang berkompeten dalam pelaksanaan kebijakan, tetapi juga meliputi kerjasama kekuatan politik, ekonomi dan sosial. Dalam tahapan praktis, implementasi yaitupengimplementasian kebijakan. Dimana melalui tahapan yaitu :

1. Pengesahan aturan dalam perundang-undangan
2. Pelaksanaan keputusan

3. Kesiediaan target grup dalam melaksanakan keputusan
4. Hasil keputusan yang sesungguhnya baik yang diharapkan maupun tidak
5. Hasil keputusan seperti yang diinginkan instansi pelaksana
6. Upaya perbaikan atau kebijakan atau peraturan perundangan (Deddy Mulyadi, 2016:12-13).

d. Evaluasi Kebijakan

Dalam evaluasi kebijakan publik, kebijakan yang telah diimplementasikan akan dilakukan evaluasi untuk melihat apakah kebijakan tersebut benar-benar memberikan hasil seperti yang diharapkan. Kebijakan Publik hakikatnya dibuat untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Kebijakan publik ini diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, dibuatlah kriteria-kriteria yang menjadi acuan dalam mengevaluasi apakah kebijakan publik benar-benar memberikan dampak seperti yang diharapkan (Budi Winarno, 2012:37).

B. Evaluasi Kebijakan Publik

Kegiatan evaluasi merupakan sebuah tahapan yang penting dalam proses analisis kebijakan publik. Kegiatan ini dapat memberikan satuan nilai terhadap suatu kebijakan publik yang diimplementasikan (suharno, 2013:219). Kebijakan Publik diimplementasikan dengan tujuan tertentu, yaitu untuk memperoleh manfaat tertentu dari beberapa masalah yang ada sebelumnya. Evaluasi sangat perlu dilakukan karena nantinya tentu ada beberapa kebijakan publik yang belum bisa terlaksana dengan baik seperti yang diharapkan. Oleh karenanya, sebuah evaluasi perlu dilakukan untuk melihat apa yang menjadi penyebab suatu

kebijakan tidak terlaksana seperti semestinya. Suharno (2013:221) mengatakan salah satu alasan mengapa sebuah evaluasi harus dilaksanakan jika ditinjau dari dimensi internal, yaitu untuk menghindari dari mengulangi permasalahan yang sama (*guarantee to non-recurrence*). Sebab dengan adanya keterangan yang memadai tentang hasil dari suatu kebijakan nantinya akan memberikan rambu agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam implementasi yang serupa, atau kebijakan lainnya dalam masa yang akan datang. Sejalan dengan alasan internal kedua yang dikemukakan oleh suharno (2013:221) bahwa alasan dilakukannya sebuah evaluasi adalah untuk mengetahui keberhasilan suatu kebijakan.

Menurut Winarno (2014:228-229) evaluasi suatu kebijakan merupakan langkah terakhir dalam tahap-tahap proses kebijakan. Sebagai kegiatan yang fungsional yaitu kegiatan yang dilakukan pada semua proses kebijakan publik mulai dari perumusan masalah, program-program yang dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah, implementasi, hingga dampak kebijakan. Evaluasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perkembangan dari kebijakan yang sudah dijalankan apakah sudah sesuai dengan harapan dan untuk melihat apa yang menjadi sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan. Oleh karenanya, evaluasi dapat menangkap tentang isi kebijakan dan dampak dari suatu kebijakan.

Kebijakan publik dijalankan untuk memperoleh tujuan-tujuan tertentu yang berdasarkan pada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi perlu dilakukan karena tidak semua kebijakan publik yang telah diimplementasikan meraih hasil yang diharapkan. Kebijakan publik terkadang

gagal meraih hasil dan tujuan seperti yang ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengetahui penyebab gagalnya

Kebijakan dan melihat sejauh mana perkembangan kebijakan yang telah diimplementasikan benar-benar meraih manfaat yang diharapkan. Kesimpulannya evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh “manfaat” dari suatu kebijakan yang ada (Budi Winarno,2012:229).

1. Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik setidaknya memiliki empat fungsi dalam kebijakan publik yaitu :

- a. Eksplanasi. Melalui evaluasi kebijakan maka dapat dilihat dari program yang dijalankan.
- b. Kepatuhan. Melalui evaluasi kebijakan kita bisa mengetahui apa-apa saja yang dilakukan para birokrat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- c. Auditing. Melalui evaluasi kebijakan maka diketahui apakah Output benar-benar telah sampai pada target grup serta maupun penerima lain
- d. Akunting. Melalui evaluasi kebijakan maka dapat diketahui apakah sosial ekonomi dari kebijakan tersebut meningkat atau tidak (Suratman, 2017:160).

2. Tujuan Evaluasi Kebijakan Publik

Dalam evaluasi kebijakan publik terdapat beberapa tujuan yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mengetahui hasil kerja dari kebijakan. Dengan adanya evaluasi maka dapat diketahui seberapa besar keberhasilan dari suatu kebijakan yang telah diimplementasikan.
- b. Mengukur besar biaya suatu kebijakan. Dengan evaluasi kita dapat mengetahui seberapa besar biaya dan hasil dari suatu kebijakan.
- c. Mengukur Output suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas Output dari suatu kebijakan yang ada.
- d. Mengukur dampak suatu kebijakan. Selanjutnya, evaluasi dilakukan untuk melihat dampak positif maupun negatif dari suatu kebijakan.
- e. Untuk mengetahui jika terjadi penyimpangan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan, yang dilihat melalui perbandingan antara tujuan dan sasaran dengan hasil yang dicapai.
- f. Sebagai bahan masukan untuk kebijakan selanjutnya. Tujuan evaluasi yang terakhir yaitu memberikan input bagi proses pembuatan kebijakan selanjutnya agar kebijakan yang dihasilkan akan jauh lebih baik. Input disini yaitu sumberdaya yang diperlukan sebagai masukan dalam suatu kebijakan (subarsono,2015:120-121).

3. Model Evaluasi Kebijakan Publik

Untuk mengevaluasi suatu Kebijakan, terdapat berbagai model antara lain:

a. *The Adversary Model*

Menurut model ini para evaluator di kelompokkan dalam dua tim, yakni tim advokasi yang bertugas menyajikan hasil evaluasi program yang positif, hasil dan dampak yang dinilai efektif dan baik, serta tim yang berperan menemukan hasil evaluasi program yang negative, yang gagal, yang tidak dapat tepat sasaran dan tidak efektif. Pembentukan kelompok ini untuk menjamin netralitas dan obyektifitas proses evaluasi, temuan dari kelompok ini kemudian dilakukan penilaian sebagai hasil evaluasi.

b. *The Transaction Model*

Model ini lebih menggunakan penggunaan metode studi kasus yang cenderung bersifat naturalistic, model ini memiliki dua macam, yakni evaluasi responsive (*Responsive Evaluation*) yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan secara informal, berulang-ulang, mengamati setiap aksi agar program yang dilakukan dapat digambarkan secara akurat, serta evaluasi iluminatif (*Illuminative Evaluation*) yang bertujuan untuk mengkaji program inovatif dengan memberikan deskripsi dan interpretasi terhadap pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Jadi evaluasi ini berusaha untuk mengungkapkan dan mendokumentasikan pihak-pihak yang berpartisipasi di dalam program.

c. *Goal Free Model*

Evaluasi model ini bertujuan untuk menemukan dampak nyata terhadap kebijakan dan bukan hanya sekedar menentukan dampak yang diharapkan yang telah ditetapkan dalam suatu program. Dalam upaya mencari dampak aktual ini evaluator tidak perlu mengkaji secara mendalam mengenai tujuan program

yang telah ditetapkan, sehingga evaluator berada pada kondisi bebas tujuan agar dapat menjaga/ memperhatikan obyektivitas dan kebebasan penilaian.

d. *Logic Model*

Istilah logic model diperkenalkan pada tahun 1979 pada buku "Evaluation : Promise And Performance" oleh Joseph S. Wholey. Model ini menerangkan hubungan antara sumberdaya program, aktifitas, keluaran, dan hasil jangka panjang mengenai situasi tertentu. Logic model adalah alat untuk melakukan perencanaan terhadap program yang diimplementasikan dan dilakukan guna melakukan evaluasi terhadap program yang sudah selesai ataupun sementara berjalan maupun program yang sedang direncanakan.

Logic model merupakan teori tentang hubungan sebab akibat diantara berbagai komponen dari suatu program, yaitu: sumberdaya dan prosesnya, keluarannya, serta dampak jangka pendek dan hasil jangka panjang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *Logic Model* dalam mengevaluasi program Layanan Anak Integratif, dimana terdapat empat indikator yaitu: Masukan (*input*), Process (*Proses*), Keluaran (*Outputs*), dan Hasil (*Outcomes*). Keempat indikator utama dalam logic model dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Input*: merupakan sumberdaya yang digunakan dalam suatu program, sumberdaya yang diperlukan berkaitan dengan finansial atau sumbangsih. Sumberdaya yang diperlukan umumnya berupa Sumber Daya Manusia, Dana dan Sarana dan prasarana.
2. *Proses*: merupakan bentuk kegiatan dalam suatu program untuk memperoleh hasil yang ingin dicapai. Proses disini berupa aktifitas dan

strategi yang dipakai dalam suatu program atau organisasi dalam menyusun inputs sehingga memberikan hasil yang akan dicapai suatu program.

3. *Output*: merupakan produk langsung dari suatu program, berupa produk langsung (layanan) dan target sasaran yang kemudian dicatat dalam dokumen pelaksanaan dari kegiatan.
4. *Outcome*: merupakan hasil guna (manfaat) dan respon partisipan. Perubahan yang ada memperlihatkan perkembangan dalam mencapai tujuan umum dan khusus dari suatu program. Data yang dijangkau antara lain mengenai: hasil atau keluaran program apakah sesuai dengan apa yang direncanakan, banyaknya orang yang diberikan pelayanan apakah sesuai dengan yang direncanakan, dampak dari program terhadap orang yang mendapatkan layanan apakah terjadi perubahan dari sebelum dan sesudah adanya program Layanan Anak Integratif ini.

Didalam penelitian ini model evaluasi yang digunakan yaitu Logic Model, dimana dalam mengevaluasi program Layanan Anak Integratif ini ada empat komponen utama yang digunakan dalam Logic Model yaitu: Masukan (*Input*), Proses (*Process*), Keluaran (*Outputs*), dan Hasil (*Outcomes*).

C. Program Layanan Anak Integratif

Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif (PPKAI) mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan dan rujukan terkait kesejahteraan anak yang ada di masyarakat. Pusat Kesejahteraan Anak Integratif (PPKAI) Sikamaseang, berkedudukan di bawah koordinasi pemerintah Kabupaten Gowa melalui Dinas

Sosial. Sudah menjadi tugas pemerintah memberikan secara maksimal Layanan Kesejahteraan Sosial Anak yang menyeluruh, sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Gowa untuk perlindungan anak. Tertuang dalam Perbup No. 05 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (<http://www.Dinsosgowa.or.i.2016>).

Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif (PPKAI) Sikamaseang mempunyai fungsi memberikan pelayanan bagi kelompok beresiko, pelayanan langsung respon korban, penerimaan laporan, pelaksanaan laporan, pengelolaan database dan bentuk pengaduan serta memantau dan melakukan evaluasi layanan.

1. Kelompok Sasaran Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI)
 - a. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
 - b. Anak dengan perilaku sosial menyimpang
 - c. Anak penyandang disabilitas
 - d. Anak korban kekerasan fisik, dan / atau psikis
 - e. Anak korban kejahatan seksual
 - f. Anak yang berhadapan dengan hukum
2. Fokus Layanan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif(PKSAI)
 - a. Layanan Primer atau Pencegahan

Pencegahan difokuskan pada berbagai bentuk layanan yang mencegah berbagai persoalan anak yang ditujukan bagi semua kalangan mulai anak, keluarga, masyarakat hingga para pemberi layanan. Bentuk-bentuk program dan kegiatan pencegahan dapat berupa: penyuluhan sosial dalam hal ini kerjasama antara Lembaga Perlindungan Anak dengan Pemberdayaan

Perempuan telah membentuk Forum Anak Kabupaten Gowa. Dalam forum inilah yang dilibatkan dalam beberapa kegiatan seperti sosialisasi tentang kekerasan terhadap anak maupun keterlibatan di dalam kasus-kasus anak yang terjadi di Kabupaten Gowa. Sosialisasi ini dilakukan langsung kekelompok masyarakat yang diadakan di Kantor Camat bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan. Kemudian pengembangan Puskesmas Ramah Anak Pallangga yang tentunya sangat mendukung Kabupaten Gowa yang Layak Anak.

b. Layanan Sekunder

Layanan sekunder sebagai bagian deteksi kerentanan dilakukan melalui penjangkauan kelompok beresiko. Upaya penguatan dan pencegahan dilakukan berbasis database dari berbagai data pembangunan oleh Unit Layanan Terpadu PKSAI dikaitkan dengan data layanan. Dari data dilengkapi dengan data layanan anak tersebut akan terlihat beberapa kecenderungan kejadian kasus anak atau terlihat peta masalah anak. Dengan dikuatkannya pendataan kelompok beresiko diharapkan dapat meminimalkan jumlah korban. Dengan dasar inilah maka bentuk-bentuk intervensi pencegahan atau penguatan dilakukan agar kelompok yang dianalisis sebagai kelompok beresiko tidak menjadi korban, sebagai berikut : layanan anak terlantar, layanan anak yang sedang melalui proses reintegrasi dan layanan pencatatan akte kelahiran.

c. Layanan Tersier

Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif akan segera menindaklanjuti kasus yang sifatnya darurat dengan resiko tinggi. Rujukan

tentunya sesuai dengan hasil identifikasi korban. Korban sebagai layanan tersier akan langsung mendapat rujukan kepada unit yang bentuk intervensi penanganannya adalah sebagai berikut: pendampingan korban, pemulihan anak korban pasca trauma sosial, penyediaan shelter bagi korban kekerasan, pembinaan anak jalanan, anak terlantar, anak berhadapan hukum, anak yatim piatu, pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan.

D. Penelitian Yang Relevan

Tabel 2.1 Penelitian yang relevan

No	Nama	Tahun	Judul Penelitian	Tujuan
1.	Erni Wigianti	2015	Evaluasi Program Pembinaan Anak Terlantar Di Sasana Pelayanan Sosial Anak "Kasih Mesra" Demak.	Untuk mengetahui pelaksanaan program pembinaan anak terlantar di Sasana Pelayanan Sosial Anak "Kasih Mesra" Demak. Untuk mengetahui apa saja factor pendukung dan penghambat program Pembinaan Anak Terlantar Di Sasana Pelayanan Sosial Anak "Kasih Mesra" Demak.
2.	Nike Triani	2013	Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak Balita (PKSAB) Di Kota Semarang.	Untuk Mengevaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak Balita (PKSAB) Di Kota Semarang. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung evaluasi PKSAB di Kota Semarang.
3.	Elvira Destia	2018	Evaluasi Program Anak Jalanan Di LSM Komunitas Peduli Anak Di Kampong Alur Medan.	Untuk mengetahui sejauh mana Program Anak Jalanan oleh LSM Komunitas Peduli Anak di Kelurahan Aur Medan dalam mengurangi aktivitas anak berada di jalan.

E. Kerangka Pikir

Evaluasi Kebijakan Publik diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh dampak dari suatu kebijakan yang dibuat. Program Layanan Anak Integratif adalah program yang bertujuan memberikan pelayanan bagi kelompok beresiko, layanan langsung merespon korban, menerima laporan, pelaksanaan laporan, pengelolaan database dan laporan pengaduan. Model evaluasi kebijakan yang akan digunakan adalah Logic Model oleh Joseph S. Wholey, dimana terdapat 4 tahap dalam melakukan evaluasi kebijakan, yaitu:

Bagan Kerangka Pikir



Gambar 2.2 Bagan Kerangka pikir

F. Fokus Penelitian

1. Evaluasi diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh dampak dari suatu kebijakan yang dibuat.
2. Program Layanan Anak Integratif adalah program yang bertujuan untuk memberikan pelayanan bagi anak, pelayanan langsung respon korban, penerimaan pengaduan, penatalaksanaan laporan, pengelolaan database dan laporan pengaduan.
3. *Input* (masukan) yaitu sumberdaya yang diperlukan dalam suatu program, biasanya berupa sumber daya manusia, dana, sarana dan prasarana.
4. *Proses* (Proses) merupakan bentuk aktifitas dan strategi dalam suatu program untuk memperoleh hasil yang ingin dicapai. Kegiatan biasanya berupa strategi yang dipakai dalam suatu program atau organisasi dalam menyusun inputs sehingga memberikan hasil yang akan dicapai suatu program.
5. *Output* (Keluaran) merupakan produk langsung dari suatu program, berupa layanan dan produk, kemudian dicatat dalam dokumen pelaksanaan dari kegiatan dan target sasaran dari program Layanan Anak Integratif ini..
6. *Outcome* (hasil) merupakan manfaat dan respon partisipan..Keluaran yang disini berupa prestasi atau perubahan yang dirasakan masyarakat setelah adanya program Layanan Anak Integratif ini.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

1. *Input* (masukan) merupakan sumberdaya yang digunakan, biasanya berupa sumber dana atau berupa kontribusi. Dalam hal ini sumberdaya yang

digunakan dalam program Layanan Anak Integratif umumnya yaitu berupa waktu, orang, uang, material dan peralatan.

2. *Proses* (Proses) yaitu bentuk aktifitas dalam suatu program untuk memperoleh hasil yang ingin dicapai. Dalam hal ini proses dapat berupa kegiatan dan strategi yang digunakan untuk mendukung dalam program Layanan Anak Integratif sehingga tujuan dari atau manfaat dari program ini benar-benar bisa tercapai.
3. *Output* (keluaran) merupakan produk langsung (layanan) yang di dapatkan dari suatu program yang telah dijalankan. Diperlukan kegiatan yang berupa strategi atau metode apa yang digunakan dari program Layanan Anak Integratif ini untuk menyusun inputs agar tercapai hasil yang diharapkan dalam program tersebut. Dalam hal ini apa saja layanan maupun produk dari adanya program Layanan Anak Integratif.
4. *Outcome* (hasil atau manfaat) merupakan manfaat dari suatu program. Dalam hal ini apakah tujuan umum ataupun khusus dalam program Layanan Anak Integratif ini betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan. Umumnya organisasi merumuskan Outcomes dalam waktu: jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Tempat Penelitian

Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah 2 bulan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Sosial Gowa di JL Tumanurung, No.30, Gowa dan Sekret Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) Sikamaseang di JL. Manggarupi Kabupaten Gowa. Peneliti memilih Kabupaten Gowa karena Gowa merupakan salah satu dari lima Kabupaten di Indonesia yang mengimplementasikan program Layanan Anak Integratif ini kemudian dengan alasan karenadi Kantor Dinas Sosial Gowa dan PKSAI Sikamaseang merupakan pihak yang berwenang dan bertanggungjawab dalam program Layanan Anak Integratif ini.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis dan tipe penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Kualitatif adapun maksud dari penelitian ini yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya secara jelas dilapangan. Penelitian kualitatif disebut juga metode penelitian yang bersifat alami(natural setting), karena penelitian kualitatif datanya dikumpulkan dalam kondisi yang sebagaimana adanya.

Metode kualitatif yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menyesuaikan keadaan sebenarnya dengan teori yang digunakan. Metode Kualitatif yaitu penelitian pada saat meneliti sesuatu yang bersifat natural, peneliti selaku instrumen kunci dan data dikumpulkan dengan gabungan.

C. Sumber Data

Dalam buku Sugiyono (2017), beberapa sumber referensi pada penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data Primer adalah data dan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang berupa teknik wawancara kepada informan yang dipilih serta orang atau Instansi yang terbilang bisa menjadi informan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait dalam informasi yang diinginkan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang dikumpulkan peneliti di berbagai laporan, buku-buku, serta informasi dokumen-dokumen pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa dan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif terkait yang sifatnya tertulis, keadaan personalisasi, fungsi dan tugas setiap seksi, keadaan fisik kantor, sarana dan prasarana kerja dan data lain seperti data-data mengenai Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa.

D. Informan Penelitian

Yaitu orang yang dimintai beberapa keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Pada penentuan informan di dalam penelitian ini sebagai narasumber untuk diwawancarai secara mendalam yang dilakukan dengan cara,peneliti akan memilih atau menentukan orang yang dipandang memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang hendak diteliti yaitu Instansi-instansi yang terlibat sebagai partisipan diantaranya:

Tabel 3.1 informan penelitian

No	Nama informan	Inisial	Jabatan
1.	Asrianti	AR	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Anak Dinsos Gowa
2.	Niswati	NW	Sakti Peksos Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif
3.	Sartika Ayu	SA	Sakti Peksos Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif
4.	Soraya Nugraha	SN	Sakti Peksos Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif
5.	Kawaidah Alham	KA	Kadis Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Gowa
6.	Hasniati Hayat	HH	Ketua Lembaga Advokasi Pemerhati Perempuan dan Anak Kab.Gowa
7.	Erni	ER	Orang Tua Anak Integratif
8.	Safirah	SF	Orang Tua Anak Integratif
9.	Hasbullah	HB	Orang Tua Anak Integratif
10	Muh.Arief	MA	Orang Tua Anak Integratif
Jumlah Informan			10 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang sesuai penjelasan Sugiyono (2017:224) yang merupakan langkah yang paling cepat dan strategis dalam penelitian, karena penelitian ini bertujuan mendapatkan data yang akurat. Dari beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara Langsung

Wawancara yang dilakukan didalam penelitian ini adalah wawancara yang secara langsung kepada informan serta mendalam dalam hal memperoleh informasi. Di dalam proses wawancara nantinya, penelitian akan menggunakan alat bantu berupa buku tulis dan pulpen serta alat perekam, sehingga dalam

proses wawancara berlangsung dengan baik dan memudahkan peneliti mengingat dan menalar kembali hasil wawancara saat penelitian dalam satu bentuk karya ilmiah.

2. Observasi (pengamatan)

Dalam metode pengamatan ini, peneliti akan melakukan observasi atau terjun langsung ke lokasi yang hendak diteliti untuk mendapatkan informasi yang relevan atau jelas. Observasi ini juga dilakukan secara terbuka, dengan cara ini informan yang diamati bisa memberikan informasi yang sebenarnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan informasi dari beberapa sumber yang dan data sekunder yang ada hubungannya dengan penelitian ini, seperti data mengenai program Layanan Anak Integratif di Kabupaten Gowa.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Meles dan Hurbmen (Sugiyono, 2016 : 246) mengemukakan bahwa aktivitas pada analisis data kualitatif dilaksanakan secara interaktif dan berlangsung secara berkelanjutan hingga tuntas, sehingga data tersebut sudah jenuh. Adapun yang dimaksud sebagai aktivitas analisis data, yaitu: *Data Reduction, Data Display, Conclusion Drawing/verification*.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data untuk mendapatkan data yang dapat menjawab pertanyaan penelitian, bagi peneliti pemula proses reduksi data dapat dilakukan dengan membahasnya dengan orang atau teman yang dipandang ahli. Lewat diskusi

tersebut diharapkan wawasan dan pengetahuan peneliti akan berkembang, data hasil reduksi lebih bermakna dalam menjawab pertanyaan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dari data yang sebelumnya telah dikumpulkan dan dianalisis, mengingatkan bahwa penelitian kualitatif lebih kepada menyusun teks naratif. *Display* adalah format berbentuk tematik yang menyajikan informasi kepada pembaca.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/verification*).

Menurut Miles dan Huberman, langkah keberikutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dini yang dikemukakan tersebut masih bersifat sementara, dan dapat berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat, yang dapat menjadi data pendukung pada tahapan pengumpulan data selanjutnya.

G. Pengabsahan Data

Pengabsahan data ialah bentuk batasan berkaitan suatu kepastian, bahwa yang terukur benar-benar merupakan variabel yang ingin diukur (Azhari,2011). Keabsahan data diperoleh dengan cara mengumpulkan data dengan cepat. Salah satunya yaitu triangulasi, yaitu memeriksa keabsahan data dan menggunakan sumber lain diluar data itu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah melakukan perbandingan hasil pengamatan melalui wawancara, serta melakukan perbandingan antara hasil wawancara dengan beberapa informasi yang tersedia.

2. Triangulasi Teknik

Teknik data untuk memperoleh data informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka untuk menguji tingkat kepercayaan terhadap data yang dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan data terhadap sumber yang serupa dengan menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya informasi yang dihasilkan dari wawancara, kemudian dicetak dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan pengecekan melalui wawancara, observasi, atau teknik lain pada situasi dan waktu yang tidak sama. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Jika diperoleh data yang tidak sama, untuk mendapatkan data yang akurat perlu dilakukan berkali-kali.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambar Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa berada pada 119.3773° Bujur Barat dan 120.0317° Bujur Timur, 50829342862° Lintang Utara dan $5,577305437^{\circ}$ Lintang Selatan. dimana wilayahnya terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah $1.883,32 \text{ km}^2$, atau setara dengan 3,01% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan.

Secara administratif Kabupaten Gowa mempunyai batas-batas wilayah yaitu:

- 1) Sebelah utara : Berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros
- 2) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, timur Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng.
- 3) Sebelah selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto
- 4) Sebelah barat : Berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kota Makassar.

Kabupaten Gowa memiliki 2 (dua) dimensi wilayah, yakni wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tinggi. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni kecamatan parangloe, mamuju, tinggimoncong, tombolobulu dan biring bulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran rendah dan topografi tanah yang datar meliputi 9 kecamatan yakni kecamatan somba opu, bontomarannu, pattallassang,

pallangga, barombong, bajeng, bajeng barat, bontonompo dan bontonompo selatan. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 km² dengan panjang 90 km.

2. Profil Dinas Sosial Kabupaten Gowa

Dinas sosial merupakan salah satu instansi di bawah naungan Kementerian Sosial yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Awalnya Dinas Sosial Kab. Gowa yaitu bergabung dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun adanya Regulasi / pembentukan struktur baru yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, sehingga Dinas Sosial berdiri sendiri.

Adapun Visi Dinas Sosial yaitu“Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang berkeadilan dan relegius” Sedangkan **Misi dinas sosial adalah:**

1. Meningkatkan manajemen pelayanan sosial, ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian.
2. Meningkatkan kualitas, kapasitas dan profesionalitas sumber daya aparatur yang religius melalui pendidikan dan pelatihan serta penguasaan teknologi dan informasi.

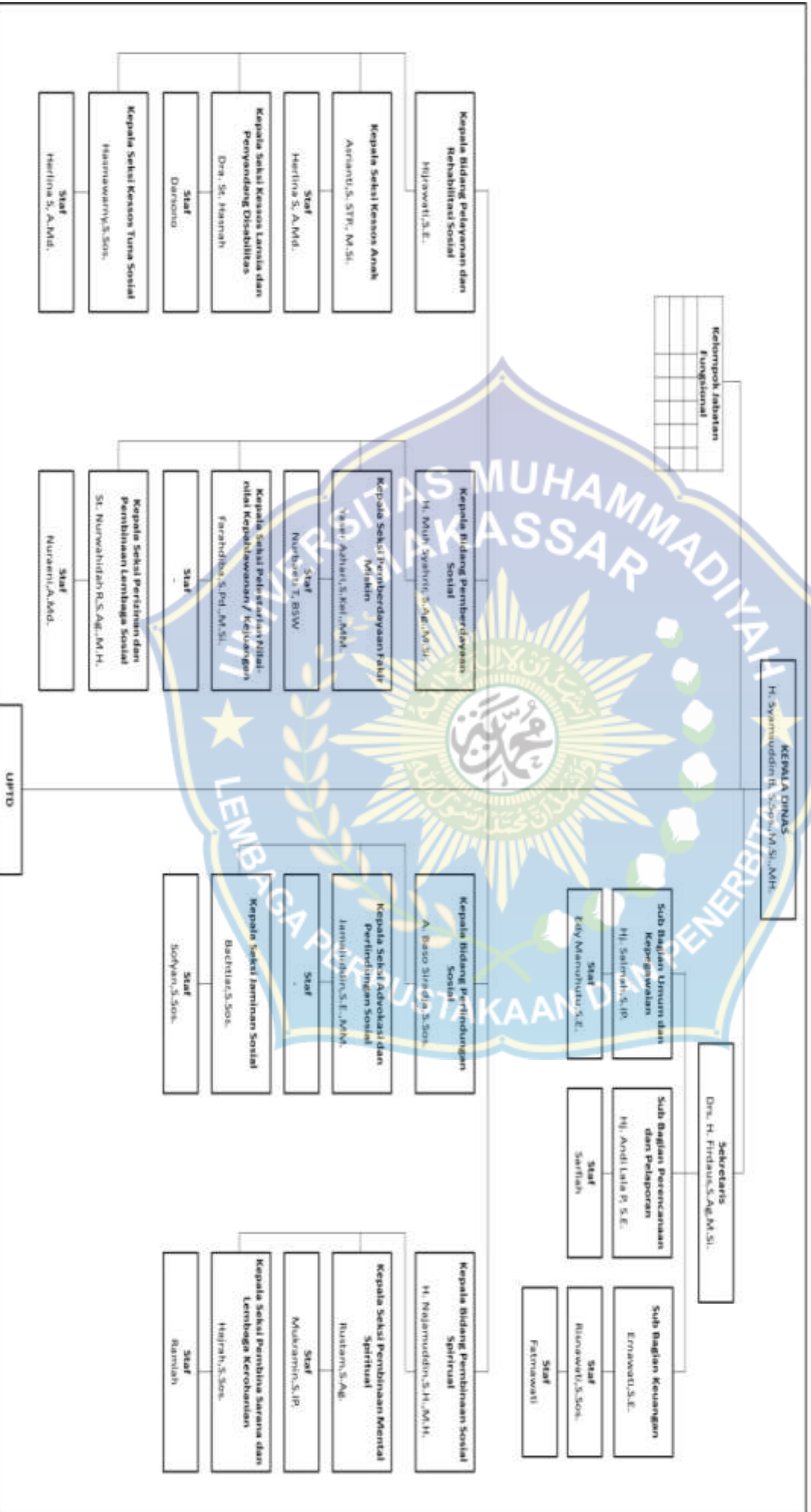
3. Mengoptimalkan pemberdayaan potensi sumber-sumber kesejahteraan sosial dan penyanggah masalah kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
4. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja.
5. Meningkatkan koordinasi antar sektoral khususnya lingkup kesejahteraan sosial.
6. Mengembangkan koordinasi yang kondusif kepada masyarakat agar mampu berperan aktif dalam pembangunan.



a) Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Gowa



STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL
KABUPATEN GOWA



b) Pembagian Tugas

Adapun uraian tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan yang ada dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
- 2) pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Sosial;
- 4) pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Dinas

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan dan umum dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- 1) pengkoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
- 2) pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- 3) pengkoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- 4) pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- 5) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan hukum.

2.2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan.

2.3. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.

3. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam

mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi bidang kesejahteraan sosial anak, kesejahteraan sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas dan kesejahteraan sosial tuna sosial sesuai lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), kepala bidang mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi bidang kesejahteraan sosial anak, kesejahteraan sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas dan kesejahteraan sosial tuna sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi bidang kesejahteraan sosial anak, kesejahteraan sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas dan kesejahteraan sosial tuna sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi bidang kesejahteraan sosial anak, kesejahteraan sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas dan kesejahteraan sosial tuna sosial;

3.1 Seksi Kesejahteraan Sosial Anak

Seksi Kesejahteraan Sosial Anak dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial melakukan kegiatan pengendalian dan pelayanan jaminan kesejahteraan sosial anak berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

3.2. Seksi Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

Seksi Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial melakukan kegiatan pengendalian dan pelayanan jaminan kesejahteraan sosial Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

3.3. Seksi Kesejahteraan Sosial Tuna Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial Tuna Sosial dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial melakukan kegiatan pengendalian dan pelayanan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh kepala bidang, mempunyai membantu Kepala Dinas tugas merencanakan operasionalisasi penyelenggaraan tugasnya terkait dengan pemberdayaan sosial meliputi Pemberdayaan Fakir Miskin, Perizinan dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan/Kejuangan sesuai lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan;

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis Pemberdayaan Sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Sosial;
- d. pelaksanaan administrasi Pemberdayaan Sosial;

4.1. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin

Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu kepala bidang Pemberdayaan Sosial merencanakan kegiatan dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan fakir miskin berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

4.2. Seksi Perizinan dan Pembinaan Lembaga Sosial

Seksi Perizinan dan Pembinaan Lembaga Sosial dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu kepala bidang Pemberdayaan Sosial merencanakan kegiatan dan melaksanakan kegiatan Perizinan dan Pembinaan Lembaga Sosial berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

4.3. Seksi Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan/Kejuangan

Seksi Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan/Kejuangan dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu kepala bidang Pemberdayaan Sosial merencanakan kegiatan dan melaksanakan kegiatan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan/Kejuangan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

5. Bidang Perlindungan Sosial

Bidang Perlindungan Sosial dipimpin oleh kepala bidang, mempunyai tugas membantu kepala Dinas Sosial dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan Perlindungan Sosial meliputi Advokasi dan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial sesuai lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan;

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Perlindungan Sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis Perlindungan Sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perlindungan Sosial;

5.1. Seksi Advokasi dan Perlindungan Sosial

Seksi Advokasi dan Perlindungan Sosial dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu kepala bidang Perlindungan Sosial dalam merencanakan kegiatan advokasi dan perlindungan sosial berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

5.2. Seksi Jaminan Sosial

Seksi Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu kepala bidang Perlindungan Sosial dalam merencanakan kegiatan jaminan sosial berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

6. Bidang Pembinaan Sosial Spiritual

Bidang Pembinaan Sosial Spiritual dipimpin oleh kepala bidang, mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pembinaan Sosial Spiritual sesuai lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan;

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Pembinaan Sosial Spiritual;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis Pembinaan Sosial Spiritual;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pembinaan Sosial Spiritual;

6.1. Seksi Pembinaan Mental Spiritual

Seksi Pembinaan Mental Spiritual dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu kepala bidang Pembinaan Sosial Spiritual dalam merencanakan kegiatan pembinaan sosial spiritual berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

6.2. Seksi Pembinaan Sarana dan Lembaga Kerohanian

Seksi Pembinaan Sarana dan Lembaga Kerohanian dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu kepala bidang Pembinaan Sosial Spiritual dalam merencanakan kegiatan pembinaan sarana dan lembaga kerohanian berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Profil Sekretariat Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Sikamseang

Sekretariat Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif (PPKAI) Kabupaten Gowa yang telah dibentuk pada tanggal 10 November 2016 oleh bupati Gowa Adnan Puricta Ichsan YL. **Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) Sikamaseang**, berada dibawah naungan koordinasi Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Dinas Sosial yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan dan rujukan terkait kesejahteraan anak lintas sektoral yang menangani kesejahteraan anak yang ada dimasyarakat.

Visi PKSAI Sikamaseang yaitu : “ Terwujudnya anak yang bermoral, cerdas, kreatif dan sejahtera dalam keluarga dan lingkungan yang aman di Kabupaten Gowa.

Misi PKSAI Sikamaseang yaitu :

1. Pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak
2. Anak yang sadar akan hak dan kewajibannya
3. Peningkatan pencegahan dan penanganan secara integratif kasus dan tindakan kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah
4. Peningkatan database layanan anak
5. Peningkatan kapasitas, aksesibilitas, dan penjangkauan terkait kesejahteraan anak.

PKSAI memberikan penanganan kesejahteraan anak berbasis sistem dengan rentang layanan mulai dari :

1. Layanan Primer atau Pencegahan

Bentuk-bentuk program dan kegiatan pencegahan dapat berupa: penyuluhan sosial dalam hal ini kerjasama antara Lembaga Perlindungan Anak dengan pemberdayaan perempuan telah membentuk Forum Anak Kabupaten Gowa. Dalam forum inilah yang dilibatkan dalam beberapa kegiatan seperti sosialisasi tentang kekerasan terhadap anak maupun keterlibatan di dalam kasus-kasus anak yang terjadi di Kabupaten Gowa. Sosialisasi ini dilakukan langsung kekelompok masyarakat yang diadakan di Kantor Camat bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan. Kemudian pengembangan Puskesmas Ramah Anak Pallangga yang tentunya sangat mendukung Kabupaten Gowa yang Layak Anak.

2. Layanan Sekunder

Layanan sekunder sebagai bagian deteksi kerentanan dilakukan melalui penjangkauan kelompok beresiko, sebagai contoh :

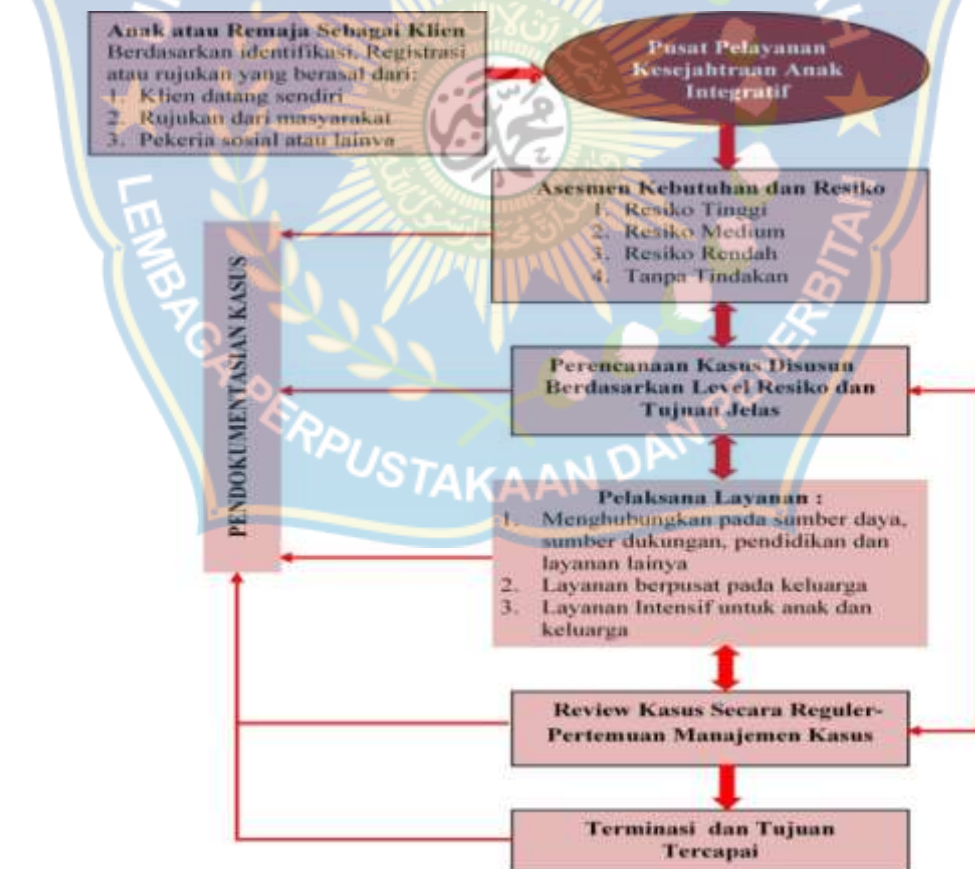
- a. Layanan pada anak keluarga miskin yang rawan putus sekolah bagi anak korban
- b. Layanan anak terlantar
- c. Layanan pencatatan kelahiran

3. Layanan Tersier

PKSAI akan segera menindaklanjuti kasus yang sifatnya darurat dengan resiko tinggi. Korban sebagai layanan tersier akan langsung mendapat rujukan kepada unit yang bentuk intervensi penanganannya adalah sebagai berikut:

- a. Pendampingan korban (meliputi anak korban kekerasan seksual, fisik, dan emosi, anak yang berhadapan hukum, anak dengan masalah kependudukan dalam hal ini tidak ada akte kelahiran). Pendampingan korban dilakukan oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial sampai anak atau klien mendapatkan pelayanan sesuai dengan layanan yang dibutuhkan.
- b. Pemulihan anak korban yang mengalami trauma dengan melakukan home visit dari Sakti Peksos bersama dengan Psikolog anak dari UIN Alauddin.
- c. Penyediaan shelter bagi korban kekerasan
- d. Pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan

ALUR PELAYANAN PKSAI SIKAMASEANG KABUPATEN GOWA



Gambar 4.2 Alur Pelayanan PKSAI Sikamaseang Kabupaten Gowa

ALUR PENANGANAN KASUS PKSAI SIKAMASEANG
KABUPATEN GOWA



Gambar 4.3 Alur Penanganan PKSAI Sikamaseang Kabupaten Gowa

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSAT PELAYANAN
KESEJAHTERAAN ANAK INTEGRATIF SIKAMASEANG KABUPATEN
GOWA



Gambar 4.4 Bagan Susunan Organisasi Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif Sikamaseang Kabupaten Gowa

Adapun pembagian pelayanan pada beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam program Layanan Anak Integratif di Kabupaten Gowa yaitu:

1. Dinas Sosial

Adapun fokus pelayanan meliputi assessment, penjangkauan dan manajemen kasus. Selain itu layanan Psikososial yang meliputi bantuan sosial dan pelayanan temu anak dan keluarga.

2. Dinas Kesehatan

Fokus pelayanan medis bagi korban, seperti visum dan pelaporan kasus kekerasan pada anak-anak.

3. Dinas Pendidikan

Fokus pelayanan pendidikan dalam memberikan bantuan bagi anak yang putus sekolah atau bahkan ingin kembali bersekolah.

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan yang berfokus pada pencatatan akte kelahiran dan data basis Kependudukan yang terintegrasi dengan layanan.

5. Dinas Pelayanan Terpadu Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)

Pelayanan yang berfokus pada kegiatan-kegiatan sosialisasi mengenai hak-hak anak kemudian melakukan penguatan jejaring kerjasama dan melakukan koordinasi dan pemantauan.

Tabel 4.1 : Data Rekap Kasus Anak Kabupaten Gowa Tahun 2017-2018

No.	Kasus	Kelompok Umur							
		Laki-laki				Perempuan			
		0-4	5-12	13-18	Total	0-4	5-12	13-18	Total
1.	Kekerasan Seksual	0	13	3	16	4	15	27	46
2.	Kekerasan Fisik	0	11	38	49	0	2	12	14
3.	Kekerasan Emosi	0	0	10	10	0	2	2	4
4.	Penelantaran	3	1	0	4	2	1	0	3
5.	Sakit Serius	1	5	13	19	4	6	5	15
6.	Masalah Kependudukan (tidak ada akte)	18	140	41	199	31	128	29	188
7.	Berkonflik dengan hukum	0	0	5	5	0	0	0	0
8.	Adopsi	2	1	0	3	2	2	0	4
9.	Disabilitas	3	7	0	10	0	7	3	10
10.	Adiksi	0	0	3	3	0	0	0	0
11.	Lain-lain	7	37	47	91	7	36	51	94
	Total				409				378

B. Implementasi Program Layanan Anak Integratif di Kabupaten Gowa.

Program Layanan Anak Integratif merupakan salah satu program yang dibuat oleh pemerintah yang diharapkan mampu mensejahterakan dan melindungi anak. Program Layanan Anak Integratif adalah transformasi Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menangani anak-anak yang beresiko dan rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran, dengan mempromosikan keterpaduan untuk penyediaan layanan secara efektif dan efisien.

Penyelenggaraan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Sikamaseang yang dikoordinir oleh Dinas Sosial Kabupaten Gowa, ditujukan untuk

mengembangkan dan memulihkan keberfungsian Sosial Anak dan lingkungan sosialnya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya secara optimal. Pengembangan dan pemulihan keberfungsional sosial dilakukan melalui memadukan layanan kesejahteraan anak dan layanan dasar lainnya dalam satu sistem sehingga dapat memberikan layanan yang komprehensif, cepat, tepat, dan tuntas. Program layanan anak integratif menerapkan manajemen kasus yang tertata dan didukung oleh sistem manajemen data.

Program Layanan Anak Integratif dilakukan pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan bagi anak-anak yang rentan terhadap resiko seperti anak berhadapan dengan hukum. Anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak balita terlantar, anak jalanan, anak terlantar dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah.

Dalam pengimplementasian program Layanan Anak Integratif di Kabupaten Gowa, Dinas Sosial Kabupaten Gowa dalam hal ini bekerjasama dengan beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh anak integratif. Kemudian dalam implementasi program Layanan Anak Integratif ini dinas sosial bersama Pekerja Sosial dan Satuan Bakti Pekerja Sosial yang dalam hal ini menerima laporan yang masuk, kemudian Sakti Peksos melakukan assessment kasus kemudian dilanjutkan dengan mengadakan manajemen kasus untuk mengkoordinasikan layanan terkait sesuai dengan yang dibutuhkan anak.

C. Evaluasi Program Layanan Anak Integratif di Kabupaten Gowa

Evaluasi program dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan atau program yang sudah di implementasikan di masyarakat apakah program itu sudah sesuai dengan yang diharapkan. Program Layanan Anak Integratif ini merupakan program dari Kementerian Sosial yang kemudian turun ke Dinas Sosial dalam hal ini Dinas Sosial Kab. Gowa. Program Layanan Anak Integratif ini dibuat agar terwujudnya anak yang bermoral, pintar, kreatif, dan sejahtera dalam keluarga dan lingkungan yang aman.

Pada bab pembahasan, akan dijelaskan bagaimana evaluasi program layanan anak integratif dengan menggunakan teori Logic Model yang diperkenalkan oleh Joseph S. Wholey dimana ada 4 indikator untuk melakukan evaluasi yaitu : 1) Inputs (masukan) ; 2) Proses ; 3) Outputs (keluaran) dan 4) Outcomes (dampak).

1. INPUTS

Indikator input dalam teori Logic Model oleh Joseph S. Wholey adalah sumber daya yang digunakan dalam suatu program. Sumberdaya yang diperlukan berkaitan dengan finansial atau sumbangsih. Sumber daya yang diperlukan dalam program layanan anak integratif ini berupa sumber daya manusia , dana serta sarana maupun prasarana. Evaluasi atau penilaian atas capaian kinerja input dilakukan dengan melihat realisasi dana yang terserap, ketersediaan sumber daya manusia yang terlibat ketersediaan sarana atau prasarana.

Tabel 4.2 : Deskripsi Input (masukan) berdasarkan sumber daya manusia, dana serta sarana dan dalam evaluasi Program Layanan Anak Integratif di Kabupaten Gowa.

Informan	Sumber Daya Manusia	Dana	Sarana dan prasarana
Dinas Sosial	- Satuan Bakti Pekerja Sosial - Tenaga kesejahteraan sosial -Pekerja Sosial (penerima pengaduan dan registrasi) -Psikolog UIN Alauddin	APBD	-Ruang pengaduan dan pendataan -Ruang konselling dan assessment kasus -sekretariat PKS AI di Manggarupi
Pekerja Sosial Dinas Sosial (Peksos)	-Satuan Bakti Pekerja Sosial (pendampingan kasus) -Pekerja Sosial (penerima pengaduan) -SKPD penyedia layanan	APBN dan APBD	-Meja front Office dan ruang pengaduan -Ruang assessment kasus -Ruang konselling -Loket dan meja layanan -Ruang tunggu -Kotak saran
Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos)	-SKPD terkait -Pekerja Sosial dari Dinas Sosial -Sakti Peksos dari Kementrian Sosial	APBN dan APBD	-Sekretariat PKS AI -Ruang pengaduan dan pendataan -Ruang konselling dan assessment kasus
P2TP2A	-Tenaga Kesejahteraan Sosial -Pekerja sosial dan Sakti Peksos -SKPD penyedia layanan	APBN dan APBD	-Satuan bakti peksos -Pekerja Sosial -Sekretariat PKS AI di Manggarupi
Masyarakat	-Pekerja social -Tenaga Kesejahteraan Sosial	Tidak Tahu	-Loket dan meja layanan -Ruang tunggu -Ruang pengaduan

Sumber: Hasil reduksi data 2019

Pada tabel diatas merujuk pada uraian diatas mengatakan bahwa input yang berupa sumber daya manusia, dana maupun sarana dan prasarana dalam program Layanan Anak Integratif di lihat dari hasil wawancara dibawah ini :

Adapun wawancara yang dilakukan dengan informan AR dari Dinas Sosial terkait dengan Sumber daya manusia mengatakan bahwa :

“...PKSAI menyediakan layanan psikolog dan melakukan kerjasama eee ke psikolog dari UIN Alauddin terus kami sudah melakukan perjanjian kerjasama kepada seluruh SKPD terkait dengan layanan misalnya ada pengaduan di PKS AI, peksos dari dinas sosial dan satuan bakti pekerja sosial itu dititip dari Kemensos untuk menangani anak 0-18 tahun. Jadi ketika mengani anak itu, kita meregistrasi terus langsung ditangani oleh sakti peksos mengunjungi langsung korban atau yang mengadu nah hasil dari assessment

sakti peksos kita melihat lagi laporan sosialnya itu rujukan apa yang dibutuhkan misalnya anak yang datang misalnya pelecehan seksual misalnya berarti dia butuh pendidikan, pendidikan yang harus diuruskan pendidikan untuk supaya dia masuk lagi bersekolah disitu. Beberapa SKPD ada Capil, Pemberdayaan perempuan dan anak, Dinas Sosial, terus rumah sakit kesehatan terus Dinas Pendidikan (Hasil wawancara dengan AR pada tanggal 21 Januari 2019)".

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengatakan bahwa sumber daya manusia dalam program Layanan Anak Integratif yaitu pekerja sosial dan satuan bakti pekerja sosial dan SKPD terkait. Hal ini senada dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan PKSAI Sakti Peksos informan NW mengatakan bahwa :

“Kami ji dari Sakti Peksos berlima toh kita ada jadwalnya hari ini, ini yang bertugas tapi ada juga peksos dari Kabupaten yang ditugaskan ada empat. Ada orang datang mengadu toh jadi kita terima kemudian kita laporkan kesini ke ibu Anti ini anak mau dirujuk kemana. Misalnya ada orang mengadu ini anak tidak ada akte kelahirannya misalnya sulit mereka urus toh. Jadi melalui Dinas Sosial ada rujukan dibawa ke Catatan Sipil atau kalau misalnya dia putus sekolah, banyak, kekerasan, kesehatannya sesuai dengan kebutuhan korban kita damping ke dinas terkait (Hasil wawancara NW pada tanggal 4 Februari 2019)”

Berdasarkan pernyataan dari informan diatas menyatakan bahwa sumber daya manusia dalam program Layanan Anak Integratif ini yaitu Pekerja Sosial dari Dinas Sosial untuk tempat pengaduan dan Satuan Bakti Pekerja Sosial dari Kemensos sebagai pendampingan kasus kemudian rujukan pelayanan ke SKPD terkait. Hal tersebut diatas senada dengan apa yang dijelaskan oleh informan KA dari P2TP2A yang mengatakan bahwa:

“PKSAI melalui Sakti Peksosnya walaupun belum mendapat kekerasan atau sudah mendapat kekerasan Sakti Peksos yang melakukan kunjungan rumah atau Home Visit. Jadi sebenarnya PKSAI ini Bergeraknya di hulu, setelah dia terjadi kekerasan dan apabila sudah diberikan penanganan dari Sakti Peksos bisa dirujuk ke P2TP2A. Nanti disitu kami liat kebutuhannya misalnya si anak mendapat pelecehan seksual bisa dari sini kita membuatkan rujukan

kerumah sakit untuk divisum (Hasil wawancara KA pada tanggal 15 Februari 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas maka dapat diketahui bahwa Sakti Peksos PKSAI melakukan pendampingan kasus yang kemudian korban dirujuk ke SKPD terkait sesuai dengan kebutuhan korban.

Hasil wawancara lainnya dengan informan MA dari masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Permasalahan anak seperti kekerasan seksual, anak terlantar, sampai itu toh masalah akte kelahiran toh itu Program Layanan Anak Integratif. Bahkan setahu saya kalau masalah akte kelahiran itu tidak perlu lagi ambil nomor antrian di catatan sipil jadi didampingi oleh itu apa pekerja sosial yaa kemudian hanya menyetor surat rekomendasi dari Dinas Sosial itu sudah bisa dilayani (Hasil wawancara MA pada tanggal 1 Maret 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa input berupa sumber daya manusia dalam program Layanan Anak Integratif yaitu Pekerja sosial dan Satuan bakti pekerja sosial kemudian bekerjasama dengan SKPD terkait rujukan sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan. Hal ini sesuai dengan fakta yang ada dilapangan dimana laporan yang diterima oleh Pekerja Sosial kemudian dari Satuan Bakti Pekerja Sosial yang berada di sekretariat melakukan asesment awal kemudian melakukan manajemen kasus untuk melihat apa yang menjadi kebutuhan klien kemudian melakukan pendampingan kasus hingga terbit layanan yang dibutuhkan seperti klien belum mempunyai dokumen kependudukan kemudian dari Sakti Peksos melakukan pendampingan dan rujukan pelayanan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kerjasama antar sesama SKPD dalam program Layanan Anak Integratif ini

akan memudahkan dalam melakukan rujukan pelayanan pada SKPD terkait penyedia layanan.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan informan AR dari Dinas Sosial terkait dengan Sumber dana mengatakan bahwa :

“Sumber dana dari APBD dan untuk tahun lalu 2018 ada dana operasional, dari provinsi itu ada namanya dana dekon, tapi dekonnya itu hanya 3 jutaan kemarin kita PKSAI penjangkauan yaitu semua anak yang kita terima kita assessment kembali data melihat lagi misalnya untuk membuat BPJS nya kan Dinas Sosial yang mengeluarkan toh kita layani itu (Hasil wawancara AR pada tanggal 21 Januari 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengatakan bahwa sumber dana dalam program Layanan Anak Integratif yaitu APBD dan ditahun 2018 ada dana operasional kemudian dana dekon 3 jutaan. Hal ini senada dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan PKSAI informan NW dari Sakti Peksos dan Peksos mengatakan bahwa :

“Itu dibebankan pada Anggaran Belanja Negara dan didukung dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gowa. Tapi saya kurang tahu pasti berapa jumlahnya (Hasil wawancara NW pada tanggal 4 februari 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa input berupa dana dalam program Layanan Anak Integratif yaitu pada Anggaran Belanja Negara dan didukung dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gowa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Gowa No.35 Tahun 2016 dimana segala biaya dalam program Layanan Anak Integratif ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gowa. Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti yang dimana keseluruhan pelayanan yang ada dimulai dari pelaporan atau aduan yang

dilakukan oleh klien sendiri ataupun masyarakat kemudian assessment dan manajemen kasus sampai dengan pendampingan dalam mendapatkan pelayanan itu sendiri tidak dipungut biaya. Sehingga sangat membantu anak-anak yang dominan berasal dari keluarga yang kurang mampu. Seperti bantuan dari psikolog anak bagi klien yang mengalami traumatik kemudian Lembaga Bantuan Hukum bagi klien Anak yang berhadapan hukum, keseluruhan biaya yang timbul dari proses pelayanan pada program ini dibebankan pada APBN dan didukung dengan APBD.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan informan AR dari Dinas Sosial terkait dengan sarana dan prasarana mengatakan bahwa :

“Sarana dan prasarana di Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif itu meliputi: Ruang pengaduan, Ruang pendataan, Ruang konseling / mediasi, Assesment, Ruang pertemuan, kemudian Ruang Konferensi Kasus. Selain itu ada sarana pendukung lainnya seperti Ruang Administrasi, Ruang Konsultasi dan pemeriksaan, Loker layanan, meja layanan dan ruang tunggu maupun terdapat juga kotak saran (Hasil wawancara AR pada tanggal 21 Januari 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas Dinas Sosial mengatakan bahwa sarana dan prasarana dalam program Layanan Anak Integratif sudah cukup memadai dimana terdapat ruang pengaduan, ruang pendataan, ruang konseling / mediasi, assesment, ruang pertemuan, kemudian ruang konferensi kasus.

Hal ini senada dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan peksos informan SA mengatakan bahwa :

“Kalau di sekretariatnya PKSAI dek itu ada meja front office tempat pengaduan, ruang asesment kasus, ruang konselling, loket meja layanan ruang tunggu kemudian disediakan juga kotak saran itu dek (Hasil wawancara SA pada tanggal 13 Februari 2019)”

Kemudian hal yang senada dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan satuan bakti pekerja sosial informan SN mengatakan bahwa:

“Nanti ini kita liat sendirimi toh kalau ke Sekretnyaki ini sebentar. Itu seperti ruang pengaduan dan pendataan, kemudian ruang konselling dan asesment kasus bagi korban. Nantilah lengkapnya kita kesana toh sama-sama (Hasil wawancara SN pada tanggal 26 Februari 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas mengatakan bahwa sarana yang ada di sekretariat PKSAI itu terdiri atas ruang pengaduan dan pendataan kemudian ruang konselling selain itu ada juga disiapkan ruang tunggu bagi pelapor.

Hasil wawancara lainnya dengan masyarakat informan MA yang mengatakan bahwa:

“ Tidak kutahu juga jelasnya tapi waktu kesanaka itu ada meja itu tempat layanan toh, ada ruang tunggu ada juga itu tempat apa pengaduan ituji yang kutahu dek (Hasil wawancara MA pada tanggal 1 Maret 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa input berupa sarana dan prasarana dalam program Layanan Anak Integratif yaitu sekretariat Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif yang berada di JL Manggarupi kemudian dilengkapi dengan sarana yang memadai seperti ruang pengaduan dan pendataan, ruang assessment kasus dan ruang manajemen kasus yang sangat membantu dari Satuan Bakti Pekerja Sosial dalam melakukan manajemen kasus kemudian sarana pendukung seperti ruang tunggu maupun kotak sarana. Proses pelayanan dalam program ini berlangsung di Sekretariat Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif dengan sarana dan

prasarana yang memadai sehingga sangat mendukung dan memudahkan dalam pemberian pelayanan kepada anak-anak yang membutuhkan pelayanan ini.

2. PROSES

Indikator proses dalam teori Logic Model merupakan segala bentuk aktifitas pelayanan dalam suatu program untuk memperoleh hasil yang ingin dicapai. Proses dalam program Layanan Anak Integratif ini yaitu berupa aktifitas pelayanan yang diberikan dalam program ini selain itu proses disini berupa strategi yang dipakai dalam program Layanan Anak Integratif ini dalam menyusun input sehingga memberikan hasil yang akan dicapai dalam program ini.

Tabel 4.3 : Deskripsi Proses berdasarkan aktifitas dan strategi dalam evaluasi Program Layanan Anak Integratif di Kabupaten Gowa.

Informan	Aktifitas	Strategi
Dinas Sosial	Ada laporan dari korban maupun dari kepolisian kemudian register dan assessment awal. Saksi peksos wajib melakukan pendalaman dan pendampingan kasus sampai terbit rujukan yang dibutuhkan anak.	-Melakukan kerjasama antar SKPD penyedia layanan -Sosialisasi kepada masyarakat
Pekerja Sosial	Aduan yang diterima kemudian dilakukan assessment untuk kemudian mendapatkan rujukan pelayanan selanjutnya.	Sosialisasi ke masyarakat mengenai dampak kekerasan kepada anak
P2TP2A	Ada laporan yang diterima kemudian saksi peksos melakukan home visit. Kemudian apabila perlu rujukan P2TP2A tempat rujukan melalui rapat bersama..	-Melakukan kerjasama antar SKPD -Penguatan jejaring -Sosialisasi hak-hak anak
Satuan Bakti Pekerja Sosial	Laporan yang diterima kemudian keluar surat penugasan pendampingan dari Dinsos kemudian melakukan pendampingan sampai terpenuhi kebutuhan layanan korban	Melakukan konselling dan mediasi keluarga -Melakukan pendampingan anak sampai memperoleh pelayanan -Melakukan home visit
Masyarakat	Melaporkan permasalahan kemudian dari dinas sosial mendampingi.	Tidak tahu

Sumber: Hasil reduksi data 2019

Pada tabel diatas merujuk pada uraian diatas mengatakan bahwa proses yang berupa aktifitas dan strategi dalam program Layanan Anak Integratif di lihat dari hasil wawancara dibawah ini :

Adapun wawancara yang dilakukan dengan informan AR dari Dinas Sosial terkait dengan aktifitas mengatakan bahwa :

“Prosesnya ketika warga mengadu ke PKSAI atau langsung ke Dinas Sosial itu kita register terus kita assessment awal dulu karena ada form ada format yang untuk yang pengaduan toh?, jadi form-form yang ada di PKSAI yaitu: form-form pengaduan, form rujukan dan form penyelesaian masalah. Jadi hasil dari itu sakti peksos wajib untuk melakukan pendalaman kasus sampai terbit rujukan- rujukan yang dibutuhkan anak tersebut (Hasil wawancara AR pada tanggal 21 Januari 2019)”

Hal ini senada dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan peksos informan SA mengatakan bahwa :

“Ada orang datang mengadu toh jadi kita terima kemudian kita laporkan kesini ke ibu Anti ini anak mau dirujuk kemana. Misalnya ada orang mengadu ini anak tidak ada akte kelahirannya misalnya sulit mereka urus toh. Jadi melalui Dinas Sosial ada rujukan dibawa ke Catatan Sipil atau kalau misalnya dia putus sekolah, banyak, kekerasan dan semua kasus anak. Orang datang mengadu di situ di PKSAI (Hasil wawancara SA pada tanggal 13 Februari 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas informan Dinas Sosial dan peksos mengatakan bahwa aktifitas pelayanan dalam program Layanan Anak Integratif itu dari adanya laporan yang diterima kemudian setelah keluar surat penugasan dari dinas sosial dilakukan assessment oleh Sakti peksos yang bertugas melakukan pendampingan hingga korban mendapatkan layanan yang dibutuhkan. Hal tersebut diatas senada dengan apa yang dijelaskan oleh informan KA dari P2TP2A yang mengatakan bahwa:

“PKSAI melalui Peksosnya walaupun belum mendapat kekerasan atau sudah mendapat kekerasan Peksos yang melakukan kunjungan rumah atau Home Visit. Jadi sebenarnya PKSAI ini Bergeraknya di hulu, setelah dia terjadi kekerasan dan apabila sudah diberikan penanganan dari Peksos bisa dirujuk ke P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan

Anak). Nanti disitu kami kita liat kebutuhannya misalnya si anak mendapat pelecehan seksual bisa dari sini kita membuatkan rujukan kerumah sakit untuk divisum dan PKSAI juga bisa. Karena PKSAI dan P2TP2A tidak bisa terpisahkan. Lebih rincinya lagi mengenai PKSAI itu ada di Dinsos, karena dia dibawah oleh Dinas Sosial kalau kami disini bukan hanya anak saja tetapi perempuan juga dan keluarga yang tidak mendapatkan keadilan. Anak-anak, orang tua, lansia bisa datang kesini. Jadi di P2TP2A rujukannya, kalau bisa diselesaikan oleh Peksos PKSAI tidak dirujuk lagi. Tapi selalu kita dengan Peksos berjalan bersama untuk menangani kasus. Jadi tidak jalan sendiri-sendiri. Pertama Peksos dulu kerumahnya setelah itu kita rapatkan bersama-sama bagaimana penganannya begitu (Hasil wawancara KA pada tanggal 15 Februari 2019)”

Hal ini senada dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan SN dari Sakti Peksos mengatakan bahwa :

“Dimulai dari jika ada pengaduan yang tadi di PKSAI, itu mengadu dulu. Setelah ada pengaduan itu kami proses, dilimpahkan di Sakti Peksos, Sakti Peksos itu awalnya mengambil keterangan istilahnya itu assessment. Sudah assessment diliat disitu memang ada semua kan kronologis masalah. Aspek apa sih yang dibutuhkan contoh kan ada beberapa aspek pendidikan, kesehatan, ee apakah dia butuh psikolog disitu akan keliatan oh ternyata klien putus sekolah? Kalau putus sekolah kan ee bagaimana sih rujukannya di Dinas Pendidikan apakah dia ikut paket c atau melanjutkan lagi pendidikannya itu. Kalau kesehatan eee mengupayakan anak mendapat Kartu Indonesia Sehat, KIS, gitu kan kalau memang tidak terjadi masalah kesehatan tapi jika terjadi masalah kesehatan contohnya apa ee kasusnya pelecehan itu yang kita damping visum ke Rumah Sakit itu (Hasil wawancara SN pada tanggal 26 Februari 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas informan P2TP2A dan Sakti peksos mengatakan bahwa aktifitas pelayanan dalam program Layanan Anak Integratif adanya laporan yang diterima kemudian dilakukan pendampingan oleh Sakti Peksos sampai korban menerima layanan yang dibutuhkan. Hal tersebut senada dengan penjelasan yang diberikan oleh masyarakat informan MA yang mengatakan bahwa:

“ Permasalahan anak seperti kekerasan seksual, anak terlantar, sampai itu toh masalah akte kelahiran toh itu Program Layanan Anak Integratif. Bahkan setahu saya kalau masalah akte kelahiran itu tidak perlu lagi ambil nomor antrian di catatan sipil jadi didampingi oleh itu apa eee pekerja sosial yaa kemudian hanya menyeter surat rekomendasi dari Dinas Sosial itu sudah bisa dilayani (Hasil wawancara MA pada tanggal 1 Maret 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa proses berupa aktifitas dalam program Layanan Anak Integratif yaitu ada laporan yang diterima kemudian dilakukan assessment awal dan manajemen kasus. Hal ini sesuai dengan hasil observasi peneliti dilapangan dimana laporan yang diterima kemudian sesuai surat penugasan dari Dinas Sosial Sakti Peksos melakukan assessment dan manajemen kasus kemudian melakukan pendampingan sampai terbit layanan rujukan yang dibutuhkan korban. Sehingga anak (klien) yang tadinya takut untuk melaporkan permasalahan yang dihadapinya namun setelah adanya pendampingan kasus oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial ini sudah tidak merasakan kekhawatiran lagi karena sudah ada yang mendampingi sampai pelayanan yang dibutuhkan anak ini sudah terpenuhi.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan informan AR dari Dinas Sosial terkait dengan Strategi mengatakan bahwa:

“ Semua SKPD ada Sembilan kalau tidak salah Bappeda, Capil, Pemberdayaan perempuan dan anak, Dinas Sosial, terus rumah sakit kesehatan terus Dinas Pendidikan. Kemudian kita lakukan sosialisasi mengenai program Layanan Anak Integratif kepada masyarakat (Hasil wawancara AR pada tanggal 21 Januari 2019)”

Hasil wawancara lainnya dengan Peksos oleh informan SA mengatakan bahwa:

” Kami melibatkan diri dengan intens melakukan sosialisasi baik dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi langsung ke kelompok masyarakat atau sosialisasi di Kantor Camat bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Hasil wawancara SA pada tanggal 13 Februari 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas informan Dinas Sosial dan peksos mengatakan bahwa Strategi dalam memberikan pelayanan dalam program Layanan Anak Integratif yaitu dengan menjalin kerjasama antar SKPD kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program Layanan Anak Integratif.

Hasil wawancara dengan informan diatas senada dengan hasil wawancara informan KA dari P2TP2A yang mengatakan bahwa:

“yaa kami selalu meningkatkan penguatan jejaring kerjasama antar SKPD selain itu kami mengadakan sosialisasi hak-hak anak kepada masyarakat....(Hasil wawancara KA pada tanggal 15 Februari 2019)”

Hasil wawancara lainnya yang dikemukakan oleh informan SN dari Sakti Peksos yang mengatakan bahwa:

“ kami dari sakti peksos ya itu tadi yang saya bilang supaya agar anak-anak ini mendapatkan pelayanannya yaa kami melakukan pendampingan, kami lakukan home visit kerumah klien, kami menyebutnya klien yaa anak-anak yang kami tangani ini, jadi seperti itu dek....(Hasil wawancara SN pada tanggal 26 Februari 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa proses yang berupa strategi yang digunakan dalam mendukung berjalannya program Layanan Anak Integratif yaitu melakukan pendampingan kasus korban (klien) oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial dan penguatan jejaring kerjasama di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

penyedia layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penguatan kerjasama yang dilakukan dengan SKPD penyedia layanan, program Layanan Anak Integratif ini bisa berjalan dengan baik karena mempermudah dalam melakukan rujukan layanan yang dibutuhkan anak. Selain itu peningkatan dalam memberikan sosialisasi ke masyarakat mengenai dampak kekerasan kepada anak sehingga diharapkan nantinya masyarakat jika melihat bentuk kekerasan terhadap anak bisa segera melaporkan permasalahan ini sehingga dapat ditangani segera dan kekerasan terhadap anak nantinya dapat diminimalisir.

3. OUTPUT

Indikator Output dalam teori Logic Model merupakan produk langsung yang dihasilkan berupa pelayanan dalam program Layanan Anak Integratif dan siapa yang menjadi target sasaran dalam program ini.

Tabel 4.4 : Deskripsi Output berupa produk (layanan) dan target sasaran dalam evaluasi Program Layanan Anak Integratif di Kabupaten Gowa.

Informan	Produk (layanan)	Target sasaran
Dinas Sosial	Mengkoordinasikan agar klien (korban) tersebut mendapatkan layanan yang dibutuhkan (aspek pendidikan, kesehatan, psikolog)	Anak saja 0-18 tahun
Pekerja Sosial	Pelayanan respon kasus terhadap aduan yang diterima	Anak 0-18 tahun
P2TP2A	-Memberikan pendampingan kasus -Penguatan jejaring di SKPD sehingga memudahkan dalam melakukan rujukan	Semua anak yang membutuhkan pelayanan
Satuan Bakti Pekerja Sosial	-Pelayanan pendampingan kasus -Pendampingan sesuai aspek pelayanan yang dibutuhkan anak -Home visit	Semua anak, fokus pelayanan anak-anak yang membutuhkan layanan khusus seperti korban kekerasan, penelantaran semua permasalahan anak
Masyarakat	-Tempat pengaduan -Pendampingan sampai mendapatkan layanan yang dibutuhkan	Anak

Sumber: Hasil reduksi data 2019

Pada tabel diatas merujuk pada uraian diatas mengatakan bahwa Output yang berupa produk (layanan) dan target sasaran dalam program Layanan Anak Integratif di lihat dari hasil wawancara dibawah ini :

Hasil wawancara dengan Dinas Sosial informan AR yang tentang Produk (layanan) mengatakan bahwa :

“PKSAI menyediakan layanan psikolog dan melakukan kerjasama ke psikolog dari UIN Alauddin terus kami sudah melakukan kerjasama kepada seluruh SKPD terkait dengan layanan misalnya ada pengaduan di PKSAI, sakti peksos satuan bakti pekerja sosial itu dititip dari Kemensos untuk menangani anak 0-18 tahun. Jadi ketika mengani anak itu, kita mendaftarkan terus langsung ditangani oleh sakti peksos mengunjungi langsung korban atau yang mengadu nah hasil dari assessment sakti peksos kita melihat lagi laporan sosialnya itu rujukan apa yang dibutuhkan misalnya anak yang datang misalnya pelecehan seksual misalnyaberarti dia butuh pendidikan, pendidikan yang harus diuruskan pendidikan untuk supaya tidak masuk lagi disitu sampai kasusnya selesai atau tetap terus kita dampingi, ke2 psikolog untuk menghilangkan trauma ketika, ketika dia misalnya tidak nyaman untuk tinggal di keluarganya...(Hasil wawancara dengan AR pada tanggal 21 Januari 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas menjelaskan bahwa Dinas Sosial melakukan respon kasus dan pendampingan anak (klien) dalam hal ini penugasan kepada Sakti Peksos selanjutnya mengkoordinasikan agar mendapatkan layanan yang dibutuhkan.

Hal tersebut senada dengan penjelasan yang diberikan Pekerja Sosial informan SA yang mengatakan bahwa:

“Pendampingan tergantung kebutuhannya dimana dimulai dari jika ada pengaduan yang tadi di PKSAI, itu mengadu dulu. Setelah ada pengaduan itu kami proses, dilimpahkan di Sakti Peksos, Sakti Peksos itu awalnya mengambil keterangan istilahnya itu assessment. Sudah assessment dilihat disitu memang ada semua kan kronologis masalah. Aspek apa sih yang dibutuhkan contoh kan ada beberapa aspek pendidikan, kesehatan, ee apakah

dia butuh psikolog disitu akan keliatan oh ternyata klien putus sekolah? Kalau putus sekolah kan bagaimana sih rujukannya di Dinas Pendidikan apakah dia ikut paket c atau melanjutkan lagi pendidikannya itu. Kalau kesehatan mengupayakan anak mendapat Kartu Indonesia Sehat, KIS, gitu kan kalau memang tidak terjadi masalah kesehatan tapi jika terjadi masalah kesehatan contohnya apa kasusnya pelecehan itu yang kita dampingi visum ke Rumah Sakit itu. Yang pentingkan pada intinya kepentingan terbaik anak mencapai hak-haknya gitu (Hasil wawancara dengan SA pada tanggal 13 Februari 2019)”

Hasil wawancara lainnya dengan P2TP2A oleh informan KA mengatakan bahwa:

“PKSAI melalui Peksosnya walaupun belum mendapat kekerasan atau sudah mendapat kekerasan Peksos yang melakukan kunjungan rumah atau Home Visit. Jadi sebenarnya PKSAI ini bergerak di hulu, setelah dia terjadi kekerasan dan apabila sudah diberikan penanganan dari Peksos bisa dirujuk ke P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak). Nanti disitu kami kita liat kebutuhannya misalnya si anak mendapat pelecehan seksual bisa dari sini kita membuatkan rujukan kerumah sakit untuk divisum dan PKSAI juga bisa. Karena PKSAI dan P2TP2A tidak bisa terpisahkan...(Hasil wawancara dengan KA pada tanggal 15 Februari 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas menjelaskan bahwa program Layanan Anak Integratif ini memberikan pelayanan memberikan pendampingan anak dalam mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan di SKPD terkait. Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan informan SN dari Satuan Bakti Pekerja Sosial yang mengatakan bahwa:

“Kalau kami itu Sakti Peksos dek pendamping, Dinas Sosial mengeluarkan surat penugasan siapa yang mendampingi kita melakukan pendampingan dengan kunjungan langsung namanya Home Visit, kita langsung kerumah klient melihat situasi klient terus melihat perkembangan klient setelah dan sebelum terjadinya kasus setelah kita assessment secara mendalam otomatis kita sudah tahu setiap perubahan dari si klient dan ini kebutuhannya dan setelah itu kami sakti peksos buat laporan sosial yang harus dilihat Kepala Dinas Sosial dan Kasie Anak dan setelah kita dapatkan masalahnya klient kebutuhannya klient (Hasil wawancara dengan SN pada tanggal 26 Februari 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas jelas bahwa layanan yang diberikan dalam Program Layanan Anak Integratif ini yaitu berupa pendampingan korban sampai terpenuhinya aspek layanan yang dibutuhkan korban. Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan informan orang tua anak integratif yang mengatakan bahwa:

“Iye itumi dek. Sudah dua kali kerumah itu pegawainya inimi yang kedua ini. Yang pertama itu waktu itu kita melapor di kantor polisi. Datangmi juga itu pegawai dari dinas sosial juga datang pergi Tanya-tanya toh. Anuji pegawainya na dampingi toh pergi kantor polisi. Pernah juga datang kesini sama itu apa psikolog anak disitumi na tanya-tanya itu anakku...(Hasil wawancara dengan MS pada tanggal 5 Maret 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa Output berupa pelayanan yang diberikan dalam program Layanan Anak Integratif yaitu pendampingan dan respon kasus dan mengkoordinasikan sampai korban (klien) mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. Dengan adanya pelayanan Layanan Anak Integratif ini memberikan wadah bagi anak-anak yang menjadi korban mulai dari sebagai tempat pengaduan kemudian didampingi sampai memperoleh layanan yang dibutuhkannya. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dengan adanya pelayanan ini anak-anak yang menjadi korban dan keluarga korban yang biasanya takut dan malu untuk mengadakan kemudian dengan adanya program ini sudah ada yang mewadahi sebagai tempat pengaduan dan kemudian betul-betul didampingi sampai klien (anak) memperoleh apa yang kemudian menjadi kebutuhannya.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan informan AR dari Dinas Sosial terkait dengan target sasaran mengatakan bahwa:

“PKSAI itu Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif semua anak yang rentan dan beresiko itu ditangani misalnya ketika anak tidak memiliki akte kelahiran, ketika anak e disabilitas, ketika anak berhadapan dengan hukum, ketika anak membutuhkan psikolog ketika anak terlantar atau bayi terlantar itu kita tangani, PKSAI menangani anak 0-18 tahun (Hasil wawancara dengan informan AR pada tanggal 21 Januari 2019)”

Hal tersebut senada dengan penjelasan yang diberikan Pekerja Sosial informan SA yang mengatakan bahwa:

“Anak yang mendapatkan kekerasan, kekerasan apa? Karena kan kekerasan ada berapa? Ada tiga kan. Kekerasan fisik, seksual dan emosional. Nah itu semua kita tangani dek...(Hasil wawancara dengan informan SA pada tanggal 13 Februari 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, informan Dinas Sosial dan peksos mengatakan bahwa target sasaran dalam program Layanan Anak Integratif yaitu anak 0-18 tahun yang membutuhkan pendampingan baik itu di bidang pendidikan, kesehatan dan psikolog anak yang memang sesuai kebutuhan dari klien (korban).

Selain itu hasil wawancara lainnya dilakukan dengan informan KA dari P2TP2A terkait dengan target sasaran yang mengatakan bahwa:

“Nanti disitu kami kita liat kebutuhannya misalnya si anak mendapat pelecehan seksual bisa dari sini kita membuatkan rujukan kerumah sakit untuk divisum dan PKSAI juga bisa. Karena PKSAI dan P2TP2A tidak bisa terpisahkan. Lebih rincinya lagi mengenai PKSAI itu ada di Dinsos, karena dia dibawah oleh Dinas Sosial kalau kami disini bukan hanya anak saja tetapi perempuan juga dan keluarga yang tidak mendapatkan keadilan. Anak-anak, orang tua, lansia bisa datang kesini (Hasil wawancara dengan informan KA pada tanggal 15 Februari 2019)”

Kemudian diperjelas dengan informan SN dari Satuan Bakti Pekerja Sosial yang mengatakan bahwa:

“Nda, bukan cuma itu. Semua anak 0-18 tahun. Tapi khusus anak berhadapan hukum tidak bisai dilanjut proses hukumnya kalau tidak ada

laporan sosialnya dari sakti peksos. Kalau kami itu Sakti Peksos Satuan Bakti Pekerja Sosial memang khusus kayak itu kalau ada kasus kan kami memang lima orang ini di Gowa toh. Di Indonesia di semua Kabupaten yang memang ada program Layanan Anak Integratif itu ada Sakti Peksosnya dari Kementerian Sosial Direktorat Anak (Hasil wawancara dengan informan SN pada tanggal 26 Februari 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, informan P2TP2A dan Sakti peksos yang mengatakan bahwa target sasaran dalam program Layanan Anak Integratif yaitu semua anak dari umur 0-18 tahun yang mempunyai permasalahan ini yang menjadi target sasaran dalam program ini.

Berbeda dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan MS dari orang tua anak yang mengatakan bahwa:

“Tidak kutahumi juga dek ka itu hari di dinas sosialja melapor ini kita. Baru langsungmi ada ini pegawainya yang telfon itumi yang kerumah datang (Hasil wawancara dengan MS orang tua anak integratif pada tanggal 5 Maret 2019)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa Output berupa target sasaran dalam program Layanan Anak Integratif yaitu anak dari 0-18 tahun. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan program Layanan Anak Integratif ini memang hanya berfokus kepada anak-anak yang membutuhkan pelayanan khusus seperti anak korban kekerasan baik kekerasan fisik, mental dan seksual, anak yang putus sekolah, anak yang belum mempunyai dokumen kependudukan, anak yang menjadi korban penelantaran dan semua permasalahan anak.

4. OUTCOME

Indikator Outcome dalam teori Logic Model merupakan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat setelah adanya program Layanan Anak Integratif. Outcome disini melihat seperti apa respon dan tanggapan masyarakat setelah adanya program Layanan Anak Integratif ini.

Tabel 4.5 : Deskripsi Outcome berupa manfaat, harapan dan respon partisipan dalam evaluasi Program Layanan Anak Integratif di Kabupaten Gowa.

Informan	Manfaat	Respon Partisipan
Dinas Sosial	Anak yang beresiko bisa mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan	Baik, karena program ini membantu anak-anak (korban)
Pekerja Sosial	Pelayanan dari segi penanganan dan respon kasus	Sangat terbantu
P2TP2A	Penanganan secara integratif kasus dan tindakan kekerasan, perlakuan salah dan penelantaran	Sangat baik dan terbantu dengan adanya program ini Baik
Satuan Bakti Pekerja Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan pelayanan anak -Pendampingan anak (Klient)	Baik, sangat terbantu
Masyarakat	Tempat aduan dan pendampingan pelayanan	Sangat baik, karena sangat membantu
Masyarakat	Permasalahan anak tertangani dengan baik dengan adanya pendampingan	Sangat baik
Masyarakat	Anak-anak bisa terlindungi dari kekerasan dan bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan	Sangat bagus, kita terbantu

Sumber: Hasil reduksi data 2019

Pada tabel diatas merujuk pada uraian diatas mengatakan bahwa Outcome yang berupa manfaat dan respon partisipan dalam program Layanan Anak Integratif di lihat dari hasil wawancara dibawah ini :

Hasil wawancara dengan Dinas Sosial informan AR Outcome yang berupa manfaat mengatakan bahwa :

“ Anak Integratif semua anak yang rentan dan beresiko itu ditangani misalnya ketika anak tidak memiliki akte kelahiran, ketika anak disabilitas, ketika anak berhadapan dengan hukum, ketika anak membutuhkan psikolog ketika anak terlantar atau bayi terlantar itu kita tangani ,PKSAI menangani anak 0-18 tahun. PKSAI menyediakan layanan psikolog dan melakukan kerjasama ke psikolog dari UIN Alauddin terus kami sudah melakukan perjanjian kerjasama kepada seluruh SKPD terkait dengan layanan...(Hasil wawancara dengan informan AR pada tanggal 21 Januari 2019)”

Hal tersebut senada dengan penjelasan yang diberikan Pekerja Sosial informan SA yang mengatakan bahwa:

“Ya iyalah. Tempat penanganan? Tentunya setelah adanya program ini klien atau korban anak yah sudah ada tempat pengaduan, kemudian kita dampingi toh Begitu? kamu liat dari siklus penanganan gitu setelah ada ini program tentu tertangani dengan baik (Hasil wawancara dengan informan SA pada tanggal 13 Februari 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, informan Dinas Sosial dan pekerja sosial mengatakan bahwa manfaat dalam program Layanan Anak Integratif yaitu dari segi penanganan dan reskon kasus anak-anak yang beresiko bisa mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan.

Selain itu hasil wawancara lainnya dilakukan dengan informan KA dari P2TP2A yang terkait dengan manfaat mengatakan bahwa:

“Jadi begini PKSAI adalah suatu lembaga yang memberikan layanan kepada anak yang rentan terhadap kekerasan, perlakuan salah dan penelantaran. Nanti disitu kami kita liat kebutuhannya misalnya si anak mendapat pelecehan seksual bisa dari sini kita membuat rujukan kerumah sakit untuk divisum dan PKSAI juga bisa. Karena PKSAI dan P2TP2A tidak bisa terpisahkan...(Hasil wawancara dengan informan KA pada tanggal 15 Februari)”

Hasil wawancara lainnya dengan informan SN dari Sakti Peksos yang mengatakan bahwa:

“Yang namanya kasus anak sakti peksos itu karna kita memang khusus anak kalau diluar anak diatas delapan belas tahun itu bukan kami. Anak terlantar, anak adopsi yang pengangkatan anak peksos juga itu kan kalau pengangkatan anak itu ada orang mengajukan berkas mengangkat anak atau melegalkan anak angkat dia datang kesini dikasi persyaratan untuk maju ke sidang. Pokoknya semua kasus anak atau masalah anak misalnya dia sakit tidak ada jaminan kesehatannya kita rujuk ke dinas sosial kalau memang dia betul-betul orang tidak mampu dibuatkan disini KIS yang gratis toh...”(Hasil wawancara dengan informan SN pada tanggal 26 Februari 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, informan P2TP2A dan Satuan Bakti Pekerja Sosial mengatakan bahwa manfaat dalam program Layanan Anak Integratif yaitu dari segi pendampingan kasus dan penanganan secara integratif kasus dan tindakan kekerasan, perlakuan salah dan penelantaran.

Hasil wawancara lainnya yang dikemukakan oleh masyarakat informan MA yang mengatakan bahwa:

“...Permasalahan anak seperti kekerasan seksual, anak terlantar, sampai itu toh masalah akte kelahiran itu Program Layanan Anak Integratif. Bahkan setahu saya kalau masalah akte kelahiran itu tidak perlu lagi ambil nomor antrian di catatan sipil jadi didampingi oleh itu apa pekerja sosial yaa kemudian hanya menyetor surat rekomendasi dari Dinas Sosial itu sudah bisa dilayani (Hasil wawancara dengan informan MA pada tanggal 1 Maret 2019)”

Hal ini senada dengan hasil wawancara oleh orang tua anak integratif informan ER yang mengatakan bahwa :

“ Bagus sekalimi karena anu toh dengan adanya pendampingan oleh sakti peksos ini kan kami ada yang mendampingi. Biasa kasian ini kita takut mau laporkan kemana kalau ini kan kita ada yang bantu kasian, ditemaniki mengurus apa-apanya toh...(Hasil wawancara dengan informan ER pada tanggal 1 Maret 2019)”

Kemudian hal senada juga dengan hasil wawancara oleh orang tua anak integratif informan MS yang mengatakan bahwa:

“Iye dek. Sudah dua kali kerumah itu pegawainya inimi yang kedua ini. Yang pertama itu waktu itu kita melapor di kantor polisi. Datangmi juga itu pegawai dari dinas sosial juga datang pergi tanya-tanya toh sama-samaki semua na temani mengurus ini semua..(Hasil wawancara dengan informan MS pada tanggal 3 Maret 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan informan masyarakat dan orang tua anak integratif mengatakan bahwa manfaat dalam program Layanan Anak Integratif yaitu pendampingan, dimana mulai dari pelaporan sampai penanganan mereka terus di dampingi sampai mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa Outcome berupa manfaat dengan adanya program Layanan Anak Integratif yaitu semua anak yang beresiko mendapatkan pendampingan dan penanganan secara integratif kasus dan tindakan kekerasan, perlakuan salah dan penelantaran. Dengan adanya program Layanan Anak Integratif ini sangat membantu anak-anak yang menjadi korban yang sebelumnya tidak tahu harus melaporkannya kemana. Dari segi tempat penanganan kasus dan pendampingan betul-betul membantu anak-anak (klien) namun memang perlu lebih ditingkatkan kerjasama antar pemerintah dan masyarakat sehingga memudahkan dalam segi pengaduan, karena kasus yang ditangani berasal dari laporan yang diterima. Sehingga perlu ditingkatkan sosialisasi yang merata mengenai program layanan anak integratif sehingga kedepan semua anak-anak yang menjadi korban bisa tertangani dengan baik.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan informan AR dari Dinas Sosial terkait dengan respon partisipan mengatakan bahwa:

“ Ya pasti keluarga dari anak-anak yang mendapat pelayanan ini terbantu kan karena mengurus selalu kami dampingi semua kami beserta sakti peksos wajib untuk melakukan pendalaman kasus sampai terbit rujukan- rujukan yang dibutuhkan anak tersebut (Hasil wawancara dengan informan AR pada tanggal 21 Januari 2019)”

Hal tersebut senada dengan penjelasan yang diberikan Pekerja Sosial informan SA yang mengatakan bahwa:

“Anak terlantar, anak adopsi yang pengangkatan anak peksos juga itu kan kalau pengangkatan anak itu ada orang mengajukan berkas mengangkat anak atau melegalkan anak angkat dia datang kesini dikasi persyaratan untuk maju ke sidang. Pokoknya semua kasus anak atau masalah anak misalnya dia sakit tidak ada jaminan kesehatannya kita rujuk ke dinas sosial kalau memang dia betul-betul orang tidak mampu dibuatkan disini KIS yang gratis toh (Hasil wawancara dengan informan SA pada tanggal 13 Februari 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, informan Dinas Sosial dan pekerja sosial mengatakan bahwa respon partisipan dalam program Layanan Anak Integratif yaitu sangat baik karena dengan adanya program ini dapat membantu anak-anak yang memang kebanyakan kurang mampu karena pelayanannya juga gratis.

Selain itu hasil wawancara lainnya dilakukan dengan informan KA dari P2TP2A yang terkait dengan respon partisipan mengatakan bahwa:

“Tentu sangat terbantu dengan adanya ini program kan adek bisa liat anak-anak itu kan setelah ada program ini mereka tertangani. Yang tadinya mereka takut malu untuk melaporkan kasus ini setelah ada kami ya mereka jadi ada yang dampingi (Hasil wawancara dengan informan KA pada tanggal 15 Februari 2019)”

Hasil wawancara lainnya dengan informan SN dari Sakti Peksos yang mengatakan bahwa:

“Pendampingan, banyak bentuk pendampingan tergantung kebutuhannya dimana dimulai dari jika ada pengaduan yang tadi di PKSAI. Setelah ada pengaduan itu kami proses, dilimpahkan di Sakti Peksos, Sakti Peksos itu awalnya mengambil keterangan istilahnya itu assessment. Sudah assessment dilihat disitu memang ada semua kan kronologis masalah misalnya beberapa aspek pendidikan, kesehatan, ee apakah dia butuh psikolog disitu akan kelihatan oh ternyata klien putus sekolah? Kalau putus sekolah kan ee bagaimana sih rujukannya di Dinas Pendidikan apakah dia ikut paket c atau melanjutkan lagi pendidikannya itu. Kalau kesehatan eee mengupayakan anak mendapat Kartu Indonesia Sehat, KIS, gitu kan kalau memang tidak terjadi masalah kesehatan tapi jika terjadi masalah kesehatan contohnya apa ee kasusnya pelecehan itu yang kita damping visum ke Rumah Sakit itu, itu semua kan gratis tentu program ini sangat membantu (Hasil wawancara dengan informan SN pada tanggal 26 Februari 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, informan P2TP2A dan Satuan Bakti Pekerja Sosial mengatakan bahwa respon masyarakat dalam program Layanan Anak Integratif yaitu sangat terbantu dengan adanya program ini karena dari pendampingan sampai terbit rujukan tidak dikenakan biaya jadi masyarakat yang berekonomi rendah sangat terbantu.

Hasil wawancara lainnya yang dikemukakan oleh masyarakat informan MA yang mengatakan bahwa:

“Permasalahan anak seperti kekerasan seksual, anak terlantar, sampai itu toh masalah akte kelahiran toh itu Program Layanan Anak Integratif. Bahkan setahu saya kalau masalah akte kelahiran itu tidak perlu lagi ambil nomor antrian di catatan sipil jadi didampingi oleh itu apa pekerja sosial yaa kemudian hanya menyetor surat rekomendasi dari Dinas Sosial itu sudah bisa dilayani (Hasil wawancara dengan informan MA pada tanggal 1 Maret 2019)”

Hal ini senada dengan hasil wawancara oleh orang tua anak integratif informan ER yang mengatakan bahwa :

“Program ini sangat bagus dengan adanya program ini anak-anak bisa terlindungi dan terlayani apa yang memang menjadi kebutuhannya. Ini juga

kan gratis mulai dari pelaporan kemudian identifikasi masalah sampai respon kasus itu semuanya gratis jadi sangat membantu bagi keluarga yang memang kurang mampu, kasian. Kan biasanya itu dari keluarga yang tidak mampu kasian. Seperti biasanya kalau pelakunya itu orang kaya toh dia sengaja mengulur – ulur waktu biasanya yang harusnya cepat selesai. Nah dengan adanya pendampingan oleh sakti peksos ini kan keluarga korban ada yang mendampingi (Hasil wawancara dengan informan ER pada tanggal 1 Maret 2019)”

Kemudian hal senada juga dengan hasil wawancara oleh orang tua anak integratif informan MS yang mengatakan bahwa:

“iye bagusji karena gratis kita mau mengurus apa-apanya toh gratis semua. Jadi kita ini orang yang tidak tahu kodong ada yang dampingi kita toh, jadi bagusji dek.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa Outcome berupa respon masyarakat dengan adanya program Layanan Anak Integratif yaitu sangat merespon positif banyak yang terbantu dengan adanya program ini karena kebanyakan keluarga anak korban berasal dari keluarga tidak mampu. Dengan adanya program Layanan Anak Integratif ini tentunya masyarakat sangat merespon baik karena program ini membantu menyediakan wadah tempat bagi anak-anak yang menjadi korban atau membutuhkan pelayanan. Selain itu seluruh layanan yang diberikan tidak dipungut biaya dikarenakan segala biaya dalam program Layanan Anak Integratif ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gowa. Jadi seluruh layanan yang diterima seperti pendampingan kasus untuk anak berhadapan hukum (ABH), layanan psikolog yang melakukan kerjasama dengan psikolog dari UIN Alauddin, permasalahan akte kelahiran, kesehatan dan pendidikan yang keseluruhannya gratis karena umumnya anak-anak yang

mendapatkan pelayanan ini berasal dari keluarga yang tidak mampu. Sehingga program ini sangat membantu menyelesaikan permasalahan bagi anak-anak yang membutuhkan pelayanan.

D. Dampak Program Layanan Anak Integratif di Kabupaten Gowa

Evaluasi kebijakan merupakan usaha untuk menentukan dampak dari kebijakan pada kondisi-kondisi kehidupan nyata pada masyarakat. Subarsono (2013:122), mengemukakan tentang dampak sebagai berikut, *impact* (dampak adalah akibat lebih jauh daripada masyarakat sebagai konsekuensi adanya kebijakan yang diimplementasikan.

Evaluasi dampak program harus dicermati bahwa dampak yang terjadi benar-benar sebagai akibat program yang sedang dievaluasi atau justru dampak dari program lain. Dalam kenyataannya seringkali terdapat program pemerintah yang memiliki tujuan yang saling tumpang tindih atau sejenis. Evaluasi dampak memberikan perhatian yang lebih besar kepada *output* dan dampak kebijakan dibandingkan dengan proses pelaksanaan kebijakan itu sendiri.

Menurut Dye dalam Winarno (2014:236-238), terdapat lima dimensi dari suatu dampak kebijakan, secara singkat dapat dipahami yaitu:

1. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Dengan demikian, sasaran dan dampak dalam kebijakan publik yang diharapkan dalam kebijakan harus ditentukan dari awal pembuatan kebijakan publik.
2. Kebijakan mungkin mempunyai dampak terhadap keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan dari yang telah

diperkirakan sebelumnya oleh aktor perumus kebijakan. Kebijakan-kebijakan ini dinamakan eksternalitas atau dampak yang melimpah.

3. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan di masa mendatang.
4. Evaluasi juga menyangkut unsur lain, yakni bisa langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik.
5. Menyangkut biaya tidak langsung yang ditanggung masyarakat maupun beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik. Biaya-biaya seperti ini sering tidak dipertimbangkan dalam membuat evaluasi-evaluasi kebijakan.

Dengan demikian maka kita dapat menarik suatu kesimpulan mengenai arti pentingnya evaluasi dalam kebijakan publik. Dimana setelah adanya program Layanan Anak Integratif ini sangat membantu bagi anak-anak yang memang memerlukan pelayanan. Program Layanan Anak Integratif ini memberikan penanganan pada Kesejahteraan anak yang berbasis sistem dengan berbagai layanan yang sangat membantu terkhusus bagi anak-anak yang menjadi korban dan membutuhkan pelayanan. Adapun jenis rentang pelayanan dimulai dari penyuluhan sosial mengenai penguatan pemahaman masyarakat terkait hak-hak anak, kemudian layanan pada anak keluarga miskin selain itu program ini juga akan segera menindaklanjuti kasus yang sifatnya darurat dengan resiko tinggi. Anak yang menjadi korban akan langsung mendapat rujukan dan dilakukan pendampingan korban, pemulihan anak korban pasca trauma sosial kemudian juga disediakan shelter bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Dimana yang

sebelum adanya program ini anak-anak yang mendapatkan kekerasan fisik, seksual dan masalah kependudukan tidak mempunyai wadah untuk menyampaikan permasalahan ini. Namun setelah adanya program ini anak-anak yang mengalami kekerasan (seksual, fisik dan emosi), penelantaran, sakit serius, masalah kependudukan seperti tidak ada akte, berkonflik dengan hukum, anak disabilitas, anak adopsi ini semua mendapatkan pelayanan dalam program ini. Aduan yang diterima kemudian dilakukan assessment awal dan manajemen kasus oleh Pekerja Sosial dan Sakti Peksos untuk melihat pelayanan yang dibutuhkan anak. Selain itu anak-anak yang mendapatkan pelayanan juga mendapatkan pendampingan kasus sampai terbit rujukan layanan.

Dengan berbagai manfaat yang dirasakan bagi anak-anak yang menjadi korban ini tentunya program ini harus terus di lanjutkan. Dengan peningkatan dalam pemberian pelayanan dan sosialisasi yang dilakukan secara intensif tentunya akan semakin banyak menjangkau anak-anak yang memang memerlukan pelayanan integratif ini. Sehingga kedepan visi dari Program Layanan Anak Integratif yaitu Terwujudnya Anak yang bermoral, cerdas, kreatif dan sejahterah dalam keluarga dan lingkungan yang aman di Kabupaten Gowa akan dapat diwujudkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya penelitian ini melihat bagaimana Evaluasi Program Layanan Anak Integratif di Kabupaten Gowa. Model evaluasi yang digunakan sebagai berikut:

1. Input

Input dalam program Layanan Anak Integratif yaitu terdiri atas tiga sub indikator yaitu : SDM , dana kemudian sarana dan prasarana. SDM dalam program Layanan Anak Integratif sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam memberikan pelayanan hanya saja perlu ditingkatkan jalinan kerjasama sehingga nantinya akan lebih memudahkan dalam rujukan pelayanan. Kemudian dana yang digunakan dalam program ini bersumber dari APBN dan APBD. Sarana dan prasarana sudah cukup memadai hanya saja belum adanya rumah shelter yang merata disetiap kecamatan (rumah aman sementara) bagi anak-anak yang menjadi korban.

2. Proses

Proses dalam program Layanan Anak Integratif yaitu terdiri atas dua sub indikator yaitu: aktifitas dan strategi. Aktifitas pelayanan dalam program ini sudah sesuai dengan SOP pelayanan adapun strategi harus lebih ditingkatkan lagi kerjasama antar SKPD terkait penyedia layanan selain itu perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait permasalahan anak ini juga harus lebih dimaksimalkan.

3. Output

Output disini terdiri atas dua sub indikator yaitu: produk layanan dan target sasaran. Dimana pelayanan sudah sesuai dengan alur pelayanan yang sesuai dengan pedoman SOP pelayanan begitupun dengan target sasaran dalam program ini yaitu program yang memang diperuntukkan bagi anak-anak fokus pelayanan kepada anak korban kekerasan, penelantaran dan semua permasalahan anak.

4. Outcome

Outcome yang terdiri dari dua sub indikator yaitu: manfaat dan respon partisipan. Dimana masyarakat sangat terbantu dengan adanya program ini terutama bagi keluarga anak-anak korban yang mendapatkan pelayanan ini karena semua pihak yang terlibat dalam program ini sudah memberikan pelayanan yang professional sesuai dengan pembagian tugas dalam Standar Operasional Prosedur pelayanan yang ada.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai Evaluasi program layanan anak integratif di Kabupaten Gowa, maka dari itu peneliti menyarankan:

1. Diharapkan bagi instansi-instansi yang terkait dalam program Layanan Anak Integratif, khususnya Dinas Sosial dan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif lebih meningkatkan sosialisasi mengenai hak-hak anak sehingga kedepan permasalahan anak dapat diminimalisir. Kemudian kerjasama antar

sesama SKPD terkait perlu ditingkatkan agar nantinya akan mempermudah dalam melakukan rujukan pelayanan.

2. Perlu adanya rumah shelter (rumah aman) yang merata disetiap kecamatan sehingga kedepan akan semakin banyak membantu anak-anak yang membutuhkan pelayanan .
3. Perlu adanya sekretariat pelayanan di setiap kecamatan agar lebih memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Karena saat ini hanya ada satu sekretariat yaitu Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif yang berada di JL. Manggarupi, Gowa.
4. Perlu penambahan Tenaga Kesejahteraan Sosial Anak untuk setiap Kelurahan agar lebih memudahkan dalam menjangkau anak-anak yang membutuhkan pelayanan Integratif.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pancur Siwah
- Dwijawijoto, Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Islamy, M. Irfan. 2002. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Meleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy Dinamika Kebijakan*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Nugroho, Riant. 2018. *Publik Policy*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif. 2017. Kabupaten Gowa.
- Rahman, Arief. 2017. *Modul 09 logic model*. (online): <http://www.slideshare.com/mobile/posku/modul-09-logic-model>. Akses pada tanggal 01 September 2018 pukul 17:20 Wita.
- Rakhmat. 2018. *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*. Yogyakarta : ANDI (Anggota IKAPI).
- Rusli, Budiman. 2013. *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*. Bandung : Hakim Publishing.
- Setyodarmodjo, soenarko. 2003. *Public Relations, Pengertian Fungsi dan Peranannya*. Surabaya: Papyrus.
- Suratman. 2017. *Generalisasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surabaya: Capiya Publishing.
- Subarsono. 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tahir, Arifin. 2011. *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta : PT Pustaka Indonesia Press.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.

Taufiqurakhman. 2014. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Medpress.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan publik*. Yogyakarta: CAPS.

Wirawan. 2011. *Evaluasi (Teori, Model, Standar, Aplikasi Dan Profesi)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Sumber Lain:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Bupati Gowa No. 05 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Peraturan Bupati Gowa No. 35 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Gowa.

L

A

M

P

I

R

A

N



Assessment kasus oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial di Sekretariat PKSAl
Sikamaseang



Manajemen Kasus Dinas Sosial Kab.Gowa bersama Sakti Peksos dan Psikolog
Anak



Home Visit anak korban Pelecehan Seksual oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial



Kunjungan Psikolog Anak UIN Alauddin ke rumah anak korban pelecehan seksual



Wawancara dengan informan Kasie Kesejahteraan Sosial Anak Kab.Gowa



Wawancara dengan informan Satuan Bakti Pekerja Sosial Kab. Gowa







UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Rampus Tamalatea - Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90211

Telp. 471 11 700000 Fax. 469 830000

Nomor : 1899/FSP/A.1-VIII/XII/1440 H/2018 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar

H a l : **Pengantar Penelitian**
Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kitanya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Kiki Rezkil Amalia

S t a m b u k : 105610492214

J u r u s a n : Ilmu Administrasi Negara

Lokasi Penelitian : Di Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa.

Judul Skripsi : *"Evaluasi Program Layanan Anak Integratif di Kabupaten Gowa"*.

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khseran Katziraa.
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 27 Desember 2018

D e k a n,

Uj. Wakil Dekan I

Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

NBM 1084 366



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS SOSIAL

Jalan Mesjid Raya No.30 Telp. (0411) 864024 Fax (0411) 864024 Sungguminasa 92111

Sungguminasa, 11 April 2019

Kepada,

Nomor : 460/215/DINSOS
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Balasan Telah Melakukan Penelitian**

Yth. **Ketua LP3M UNISMUH MAKASSAR**
Di-
Makassar

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. SYAMSUDDIN B, S.Sos, M.Si, MH
Nip : 19680507 198908 1 002
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IVc
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kab. Gowa

Bahwa Mahasiswa yang bersangkutan dibawah ini :

1. Nama : KIKI REZKI AMALIA
Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Nim : 105610492214

Benar telah melaksanakan Penelitian pada Dinas Sosial Kabupaten Gowa mulai tanggal 07 Januari s.d 29 Februari 2019, sebagai syarat penyusunan Skripsi/Tesis yang berjudul : "EVALUASI PROGRAM LAYANAN ANAK INTEGRATIF DI KABUPATEN GOWA"

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya di ucapkan terimah kasih.

Kepala Dinas
DINAS SOSIAL
KABUPATEN GOWA


H. SYAMSUDDIN B, S.Sos, M.Si, MH
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19680507 198908 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Gowa di Sungguminasa (sebagai laporan)
2. Arsip



REVISI PERTAMA

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF
(PKSAI) SIKAMASEANG KABUPATEN GOWA**





BUPATI GOWA

PERATURAN BUPATI GOWA

NOMOR: 35 Tahun 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN KESEJAHTERAAN ANAK INTEGRATIF
KABUPATEN GOWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

Menimbang :

- bahwa kesejahteraan anak merupakan kebutuhan yang mendesak sebab dukungan dan respon terlambat terhadap masalah anak dapat menimbulkan potensi munculnya persoalan sosial di masa depan;
- bahwa semua anak memerlukan pencegahan dari masalah anak dan penanganan kesejahteraan anak lebih efektif, efisien dan sistematis sehingga perlu dibentuk Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif Kabupaten Gowa;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gowa.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95/Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

Pedoman Wawancara

Lokasi : Dinas Sosial Kabupaten Gowa

Fokus	Indikator	Pertanyaan
Evaluasi Program Layanan Anak Integratif	1. Input	1. Bagaimana ketersediaan sumber daya manusia yang terlibat dalam program Layanan Anak Integratif ini? *
		2. Apa saja yang menjadi sarana dan prasarana dalam program Layanan Anak Integratif ini?
		3. Bagaimana sumber dana dalam program ini? Apakah pengeluaran biaya sesuai atau bahkan anggaran kurang dari yang disusun sebelumnya?
		4. Siapa saja yang terlibat dalam program Layanan Anak Integratif ini?
	2. Proses	5. Kapan program Layanan Anak Integratif ini dilaksanakan?
		6. Apa saja aktifitas atau bentuk layanan yang diberikan dalam program ini?

		7. Bagaimana proses dalam memberikan pelayanan terkait program Layanan Anak Integratif ini?
	3. Output	8. Apa tujuan dari adanya program Layanan Anak Integratif ini? Apakah tujuan tersebut betul-betul dirasakan oleh masyarakat?
		9. Siapa saja yang menjadi target atau sasaran dari program ini?
		10. Bagaimana jumlah masyarakat yang dihyani dalam program ini?
		11. Bagaimana hasil yang diharapkan dari program Layanan Anak Integratif ini?
	4. Outcome	12. seperti apa manfaat yang diperoleh masyarakat setelah adanya program Layanan Anak Integratif ini?



BIODATA PENELITI



Kiki Rezki Amalia, dilahirkan di Nunukan pada hari Minggu tanggal 20 bulan Agustus tahun 1995. Anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan Mustafa dan Endang Sujiani (Almarhumah) memiliki kakak laki-laki bernama Hafiez Hermawan dan adik laki-laki bernama Andrian Hidayat, Muh. Fazriatul Azhari dan Muh. Hairil Ramadhan. Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Inpres Bonto-Bonto Kabupaten Gowa dan lulus pada tahun 2008 kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Sungguminasa Kabupaten Gowa lulus pada tahun 2011 dan melanjutkan pendidikan ditahap selanjutnya di SMA Negeri 1 Kabupaten Gowa dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Peneliti juga aktif dalam dunia organisasi intra kampus dengan terlibat secara aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar periode 2017-2018 di bidang pemberdayaan perempuan.

Dengan ketekunan hingga motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, peneliti telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penelitian tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan khususnya dalam pengembangan disiplin Ilmu Administrasi Negara. Akhir kata peneliti mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Evaluasi Program Layanan Anak Integratif di Kabupaten Gowa”